

Membicarakan masalah pangan tidak akan selesai selama masih ada kehidupan manusia, karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia.

Ruang daya saing (*competitiveness*) dapat ditinjau dari banyaknya perspektif. Daya saing dapat diartikan dalam perspektif konsep keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dari Ricardo yang merupakan konsep ekonomi. Sementara itu, daya saing juga dapat diartikan dalam perspektif keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Konsep keunggulan kompetitif ini bukan merupakan konsep ekonomi semata, tetapi juga merupakan konsep politik dan atau konsep bisnis yang digunakan sebagai dasar bagi banyak analisis strategi untuk meningkatkan kinerja industri.

Buku Daya Saing dan Bisnis Pangan ini membahas tentang pengertian pangan, konsep daya saing, permasalahan dalam daya saing pangan, produktivitas, kualitas, skala usaha, akses petani terhadap teknologi dan pasar, rendahnya ekspor hasil pertanian, arah kebijakan pemerintah yang meliputi inovasi teknologi, penanganan pasca panen, peningkatan kases petani, pengembangan korporasi pertanian, kewirausahaan petani, pengembangan pangan fungsional, perbaikan sistem pemasaran, ekspor produk pertanian, upaya pemerintah dan strategi peningkatan daya saing pangan

# DAYA SAING & BISNIS PANGAN

DAYA SAING & BISNIS PANGAN



Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP,  
Yeni Ika Pratiwi, SP., M.Agr



www.penerbitwais.com  
6212-3204-1343  
penerbitwais@gmail.com  
Penerbit Wais  
@penerbitwais



NON FIKSI

# **DAYA SAING & BISNIS PANGAN**

**Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP,**

**Yeni Ika Pratiwi, SP., M.Agr**

**Uwais Inspirasi Indonesia**

# Daya Saing & Bisnis Pangan

**ISBN:** 978-623-227-853-0

**Penulis:** Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP,  
Yeni Ika Pratiwi, SP., M.Agr

**Tata Letak:** Galih

**Design Cover:** Widi

14,8 cm x 21 cm

vii + 96 halaman

Cetakan Pertama, September 2022

Diterbitkan Oleh:

**Uwais Inspirasi Indonesia**

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

## **Redaksi:**

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# KATA PENGANTAR

Penulis hanya bisa memanjatkan kata Alhamdulillah kepada Allah Swt. karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku Daya Saing dan Bisnis Pangan ini dalam waktu yang cukup singkat.

Buku ini disusun dari beberapa sumber terutama dari buku-buku manajemen agribisnis, artikel-artikel tentang daya saing dan bisnis pangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Buku ini menjelaskan tentang daya saing bisnis yang juga diperkuat dengan data-data statistik dan teori. Penulis hanya mengembangkannya agar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, mudah dimengerti dan mudah dibaca.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut membantu hingga terbitnya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, September 2022

**Penulis**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Pengertian Pangan.....	1
1.2. Pengertian Daya Saing.....	4
1.3. Pengertian Bisnis Pangan.....	8
1.4. Posisi Tawar Petani.....	9
1.5. Nilai Tukar Petani (NTP).....	12
<b>BAB II KONSEP DAYA SAING</b> .....	<b>16</b>
2.1. Konsep Daya Saing.....	16
2.2. Kelemahan Konsep Daya Saing .....	19
2.3. Kelemahan Konsep Daya Saing Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian.....	22
2.4. Kinerja Daya Saing Komoditas Pangan.....	28
2.5. Struktur Pengembangan Daya Saing .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN</b> .....	<b>32</b>
3.1. Produktivitas .....	33
3.2. Kualitas .....	34
3.3. Skala Usaha.....	36
3.4. Akses Petani Terhadap Teknologi dan Pasar.....	40
3.5. Belum Berkembangnya Produksi Pangan Fungsional.....	44
3.6. Akses Pasar .....	47
3.7. Rendahnya Ekspor Hasil Pertanian.....	48

<b>BAB IV ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>56</b>
4.1. Inovasi Teknologi.....	57
4.2. Penanganan Pasca Panen.....	58
4.3. Peningkatan Akses Petani .....	60
4.3.1 Teknologi .....	60
4.3.2. Sarana dan Produksi.....	62
4.3.3. Kredit .....	63
4.3.4. Pasar .....	64
4.4. Pengembangan Korporasi Pertanian .....	65
4.5. Kewirausahaan Petani .....	68
4.6. Pengembangan Pangan Fungsional.....	72
4.7. Perbaikan Sistem Pemasaran.....	74
4.8. Ekspor Produk Pertanian.....	77
4.8.1. Promosi .....	79
4.8.2. Fasilitas .....	80
4.9. Upaya Pemerintah .....	81
4.10. Strategi Peningkatan Daya Saing Pangan .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>95</b>

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Produksi Beras Tahun Periode 2018-2021 .....	4
Gambar 2. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021.....	13
Gambar 3. Daya Saing dan Faktor-Faktor Utama Penentu (Man, at all. 2002).....	29
Gambar 4. Hubungan Berbagai Bidang Kajian Dalam Pasca Produksi Hasil Pertanian.....	59
Gambar 5. Ragam Faktor Internal Penentu Kewirausahaan Petani.....	70
Gambar 6. Ragam Faktor Eksternal Penentu Kewirausahaan Petani.....	71
Gambar 7. Subsistem pada Sistem Pemasaran Pangan dan Produk Pertanian (Crawford, 1997).....	76

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Implementasi Teori Ekonomi Enam Mahzab (dalam Hutabarat dan Budiman) .....	18
Tabel 2. Komoditas Pertanian yang Berpotensi Diekspor .....	79





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pengertian Pangan

**P**angan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Istilah pangan atau *food* dalam kata mandarin dituliskan dua bagian yang satu berarti manusia atau human dan yang lain berarti baik atau good. hal itu berarti bahwa pangan sudah seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia. istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknis, seperti misalnya teknologi pangan, bukan teknologi makanan, produksi pangan bukan produksi makanan, bahan tambahan pangan bukan bahan tambahan makanan. istilah makanan digunakan bagi pangan yang telah diolah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. karena tanpa pangan tiada kehidupan dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan. Kebutuhan pangan diutarakan secara naluri, seperti bayi menangis pada saat lapar.

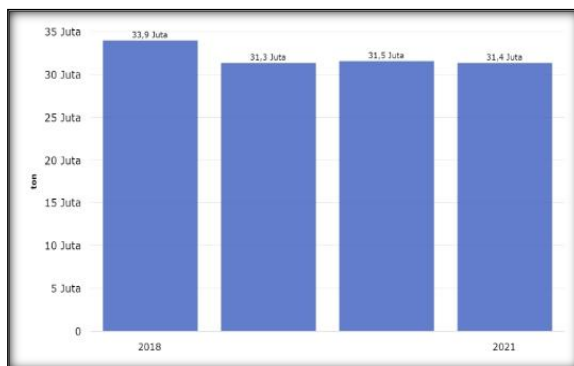
Membicarakan masalah pangan tidak akan selesai selama masih ada kehidupan manusia, karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pangan yang dikonsumsi haruslah dalam kondisi cukup, menyehatkan dan aman.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (pasal 1 ayat 1).

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkedaulatan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Sedangkan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan (pasal 1 ayat 23).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia mencapai 54,42 juta ton GKG pada 2021. Jika dikonversi menjadi beras, total produksi GKG tersebut kira-kira setara dengan 31,36 juta ton beras. Angka ini menyusut 0,45% dari produksi tahun sebelumnya yang seberat 31,5 juta ton. Jawa Timur mencatatkan produksi beras terbesar secara nasional, yakni seberat 5,65 juta ton pada 2021. Produksi beras porsinya mencapai 18,03% dari total produksi beras nasional tahun 2021. Provinsi dengan produksi beras terbesar berikutnya adalah Jawa Tengah, yakni mencapai 5,53 juta ton pada 2021, diikuti Jawa Barat seberat 5,26 juta ton. Sedangkan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan produksi beras terkecil, yakni hanya 489 ton pada 2021. Diikuti DKI Jakarta dengan produksi 1,9 ribu ton, dan Maluku Utara 1,69 ribu ton. Produksi beras 2020-2021 dihitung ulang menggunakan konversi susut/tercecer gabah berdasarkan NBM 2018-2020, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya berdasarkan NBM 2016-2018.

Sebagai informasi, produksi padi dengan kondisi gabah kering panen (GKP) mengalami penyusutan/tercecer menjadi gabah kering giling (GKG). Penyusutan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan nonpangan, seperti pakan ternak, bahan industri, maupun untuk bibit/benih. Dalam proses pengolahan GKG menjadi beras juga terjadi penyusutan/tercecer untuk kebutuhan nonpangan, seperti untuk pakan ternak maupun untuk bahan industri. Dengan demikian, produksi beras untuk penduduk hanya sekitar separuh dari produksi padi nasional.



**Gambar 1. Produksi Beras Tahun Periode 2018-2021**

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2021)

## 1.2. Pengertian Daya Saing

Di dalam kamus, daya saing dibatasi sebagai bentukan, yang berasal dari “bersaing” atau dari “persaingan” yang mengundang lawan atau perjuangan. Namun akar etimologik (latin) *cum petere* memiliki pesan kerjasama yang luas, *cum* artinya “dengan” dan biasanya bergabung (barang atau orang; lawan kata artinya ada tetapi jarang; *petere* artinya “untuk menuju” (selain “untuk menanya”). Dengan seiring waktu, saat ini pengertian asli kerjasama yang luas akhirnya digantikan oleh nuansa bersaing.

Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, sub-sektor atau negara untuk menjual atau memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar.

Daya saing merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan bisnis dan ekonomi. Namun demikian, penjelasan tentang daya saing bisa berbeda sesuai dengan aspek yang dijelaskan. Menurut Ambastha dan Momaya (2004) proses

daya saing menjadi kunci dalam koordinasi proses manajemen seperti manajemen strategik, manajemen sumberdaya manusia, manajemen teknologi, dan manajemen operasi.

Pengertian daya saing perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Pengertian daya saing mencakup sekaligus aspek kualitatif dan kuantitatif komoditas dan produk pertanian yang diperdagangkan. Aspek kualitatif mencakup pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, dan aspek-aspek sosial budaya lainnya. Sedangkan aspek kuantitatif meliputi laju perdagangan antara perusahaan, atau produsen produk dan komoditas, pematenan produk, pasokan tenaga kerja dan bahan baku, dan lain-lain.

Salah satu pertimbangan faktor pembentuk daya saing perusahaan makanan dan minuman adalah risiko atas produk makan dan minuman dengan jarak distribusi yang jauh (antar negara) dan kebutuhan konsumen. Untuk itu, Halmai dan Elekes (2002) menyarankan bahwa analisis daya saing sektor pertanian melihat juga analisis harga, subsidi ekspor, dan proteksi impor.

Cuevas (2004) mempertimbangkan bahwa produk pertanian cenderung tergantung pada kondisi geografis, variasi lingkungan dan iklim, hama dan polusi. Untuk itu, integrasi bisnis produk pertanian perlu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Kebijakan ini perlu dilakukan oleh semua negara berkembang untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pertanian termasuk kesejahteraan pelaku usahanya. Salah satu bentuk usaha yang dapat didorong pada sektor pertanian adalah

usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut Bodini dan Zanolli (2009) UKM sektor pertanian perlu didorong untuk mampu bersaing di area pasar yang lebih luas.

Mengukur daya saing tidak cukup dengan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial, kelembagaan dan sifat publiknya. Daya saing erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang secara langsung berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang diakumulasikan dalam proses pembelajaran. Konsep dan sikap daya saing berasal dan berkembang dalam budaya kelembagaan korporasi yang mendorong inspirasi untuk selanjutnya diimplementasikan di lingkungan yang tepat. Daya saing berkembang dalam suasana lingkungan yang kondusif dan berjiwa kompetitif. Budaya kompetitif positif merupakan salah satu ciri masyarakat *egaliter* yang tidak membatasi perkembangan pikiran atau gagasan dan tindakan eksperimentatif guna menentukan masa depan yang lebih baik.

Aiginger, Bärenthaler-Sieber dan Vogel (2013) telah mengidentifikasi beberapa bentuk daya saing, yaitu: daya saing harga, daya saing kualitas, dan daya saing *outcome*. Penekanan masing-masing bentuk daya saing tersebut adalah:

1. Daya saing harga bermula dari adanya upaya terhadap efisiensi biaya usaha (pada suatu perusahaan) terutama pada komponen upah, energi dan pajak.
2. Daya saing kualitas menekankan pada upaya pencapaian produktivitas usaha dan keberlanjutannya. Daya saing ini juga dapat dikaitkan dengan peranan teknologi dalam proses

bisnis sehingga dapat juga disebut sebagai daya saing teknologi.

3. Daya saing *outcome* menekankan pada komposisi dan posisi neraca perdagangan dan pembayaran suatu negara. Dengan kata lain, daya saing ini tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan indikator makro- ekonomi suatu negara.

Posisi daya saing Indonesia pada tahun 2021 menurut *Survey World Competitiveness Yearbook (WCY 2021)* yang dilakukan oleh *Institute Management Development (IMD)* menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Peringkat Indonesia di 2021 sedikit mengalami peningkatan dari posisi tahun 2019 di peringkat 40.

Willem Makaliwe, Managing Director LM FEB UI, mengatakan meskipun secara total peringkat Indonesia mengalami peningkatan, pada peringkat di negara Asia Pasifik, Indonesia tetap berada pada posisi 11 dari 14 negara, di atas India dan Filipina.

Daya saing suatu komoditas pertanian dapat diukur dengan beberapa metode, antara lain:

- *Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)*
- *Private Cost Ratio (PCR)*,
- *Export Market Share (EMS)*
- *Trade Specialization Index (TSI)*
- *Trade Acceleration Ratio (TAR)*
- *Revealed Comparative Advantage (RCA)*
- *Revealed Comparative Trade Advantage (RCTA)*.



### 1.3. Pengertian Bisnis Pangan

Di zaman yang semakin modern membuat banyak orang yang membangun suatu usaha mulai dari usaha rumahan hingga usaha yang sudah meluas ke beberapa daerah. Usaha yang dibangun oleh seseorang atau kelompok bisa dikatakan sebagai bisnis usaha. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengalami perkembangan, sehingga keuntungan yang didapatkan akan semakin banyak

Kita kerap mendengar kata bisnis. Secara historis, kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti 'sibuk' dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat.

Dalam konteks sederhana, bisnis adalah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri, untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Hal ini selaras dengan bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha atau usaha dagang. Dalam membangun sebuah usaha, pemilik usaha pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang cukup melimpah karena dengan keuntungan itu suatu usaha dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar.

---

Singkatnya, bisnis adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara perseorangan atau badan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan berbagai macam hal, seperti pembuatan, penyaluran, penjualan, dan pembelian. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengatakan bahwa bisnis berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan dapat membangun pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam membangun bisnis usaha tak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga baik itu perorangan atau badan usaha harus berusaha memikirkan untuk membuat suatu perencanaan yang matang. Hal ini perlu dilakukan agar bisnis usaha yang dibangun dapat bertahan lama, bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para kompetitor.

Bisnis yang dibangun dan dikembangkan secara individu atau dengan kelompok, sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Selain itu, dalam membangun sebuah bisnis, kita juga perlu mengetahui tujuan dari dibangunnya bisnis itu. Hal ini perlu dilakukan agar bisnis yang dibangun tidak kehilangan arah dan terus mengalami kemajuan dan perkembangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, hingga negara.

#### **1.4. Posisi Tawar Petani**

Perlindungan terhadap nasib petani sampai saat ini dinilai masih minim. Pemerintah dipandang lebih banyak melindungi konsumen, sementara nasib petani kurang diperhatikan. Efeknya, jutaan nasib petani tergolong miskin dan rentan miskin. *Petani sebagai produsen pertanian semestinya membuat petani memiliki posisi tawar sebagai penentu harga,*

*tetapi pada kenyataannya petani tidak dapat menentukan harga produk pertanian.*

Pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan harga, baik dari penjual maupun pembeli. Selama ini harga komoditas tanaman pangan pokok seperti padi dan palawija ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan harga komoditas hortikultura yakni sayuran dan buah-buahan merupakan harga pasar. Harga hortikultura tergantung pada permintaan pasar, ketersediaan stok di pasar, dan kualitas produk. Dilihat dari bentuk pasar pertanian yang oligoponi harga komoditas tanaman pangan pokok yang ditentukan pemerintah dan harga komoditas hortikultura yang sesuai harga pasar, dapat diasumsikan bahwa petani selaku produsen pertanian tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Petani lebih cenderung berperan sebagai penerima harga.

Sebagai individu petani merupakan makhluk yang rasional. Petani secara rasional memilih menanam komoditas tanaman pangan pokok yang harganya relatif lebih stabil di pasaran atau berani menanam sayuran yang harganya sesuai harga pasar. Petani yang posisi tawarnya rendah tidak dapat menentukan harga komoditas pertanian. Rendahnya posisi tawar petani mempengaruhi tingkat pendapatan petani yang selanjutnya berpengaruh pada kesejahteraan petani.

Peneliti Ekonomi Indef, Rusli Abdullah, menuturkan pemerintah memang mengklaim telah menyalurkan pupuk subsidi ke petani, tetapi sebenarnya itu hanyalah salah satu komponen dalam produksi. Menurutnya, masih ada komponen lain yang harus ditanggung petani yang nilainya justru lebih besar, seperti biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan

sebagainya. "HET (harga eceran tertinggi) misalnya, hanya melindungi konsumen, tetapi petani dibiarkan *loss* (merugi). Buktinya adanya margin yang besar oleh pedagang beras, justru petani hanya menerima harga stagnan. Sehingga petani tidak bisa menikmati fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Hal ini disebabkan oleh rantai logistik yang panjang."

Posisi tawar petani, memang lemah dan sudah puluhan tahun terjadi di Indonesia. Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada penyelesaian faktual yang benar-benar menggenjot daya tawar petani dan skala ekonomi petani kecil. Pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan membuat kelompok petani. Namun, untuk mencapai itu, kelompok tani harus memiliki hamparan lahan dalam satu hamparan. Faktanya, lahan kelompok petani terpencar-pencar. Secara mekanisme skala produksi ini tidak efisien. Seperti diketahui, mahalnya biaya produksi beras RI membuat disparitas di *middle market* di rantai distribusi beras nasional. Efeknya, harga beras Indonesia cenderung lebih tinggi dengan gap sangat lebar dibandingkan.

Posisi tawar petani dan harga padi yang rendah merupakan masalah krusial sektor pertanian Indonesia yang sulit diatasi. Upaya stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani dilakukan dengan kebijakan pengadaan pangan dalam negeri yang dimulai tahun 1969/1970. Kebijakan tersebut seharusnya mampu menciptakan *perfect market competition* sehingga petani dan pelaku pasar lain tidak dirugikan.

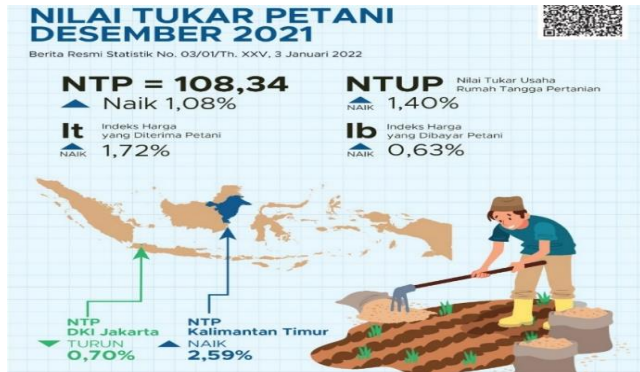
Nurhadi (2011) dalam penelitiannya mengatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kekuatan posisi tawar petani adalah kuantitas padi yang dijual, pendapatan non pertanian, kepemilikan usahatani, kualitas padi dan waktu penjualan,

sedangkan yang berpengaruh negatif adalah desakan kebutuhan. Pelaksanaan kebijakan harga gabah pembelian pemerintah pada dasarnya belum efektif sehingga menyulitkan peningkatan kekuatan tawar petani.

### **1.5. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2018 sebesar 103.16 atau dapat diinterpretasikan petani Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan NTP subsektor perkebunan rakyat bernilai 94,48 sehingga penerimaan usahatani perkebunan sebenarnya lebih rendah daripada pengeluaran petani. Data BPS menunjukkan nilai tukar petani (NTP) nasional naik 1,08 persen menjadi 108,34 pada Desember 2021. Nilai tukar usaha petani (NTUP) juga ikut naik 1,40 persen menjadi 108,52 pada Desember 2021. Kenaikan tersebut diambil dari selisih antara indeks harga terima petani yang lebih besar dibandingkan dengan indeks biaya produksi dan barang modal.



**Gambar 2. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021**

(Sumber: <https://bisnisnews.id/detail/berita/nilai-tukar-petani>)

Rendahnya NTP sebenarnya disebabkan banyak faktor, namun yang paling dominan adalah harga produk pertanian yang tidak layak. Fluktuasi harga merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum terselesaikan. Harga produk pertanian akan turun pada saat panen raya sehingga membuat petani rugi. Pada musim paceklik, harga akan naik namun petani tidak dapat menikmati keuntungan karena tidak memiliki stok produk. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, maka keadaan ini menjadi lumrah karena permintaan dan penawaran produk yang tidak seimbang akan menciptakan perubahan harga. Namun, kondisi ini membuat petani tidak rasional dengan membagikan hasil panennya secara cuma-cuma kepada pihak lain.

Sebenarnya sudah banyak solusi yang diusulkan untuk mengatasi hal ini. Salah satunya adalah kebijakan penetapan harga minimum produk seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada gabah milik petani. Namun kebijakan ini juga banyak mengalami hambatan karena Bulog sebagai pelaksana kebijakan memiliki keterbatasan dana. Bulog tidak

mungkin membeli semua produk petani karena harus memperhatikan keseimbangan keuangan perusahaan. Bahkan, apabila dilihat lebih jauh, kebijakan HPP sebenarnya tidak sepenuhnya berhasil yang dibuktikan dengan temuan kasus dimana petani harus menjual gabah di bawah HPP. Selama ini, peran Bulog hanya ke hulu. Seharusnya Bulog diperankan masuk ke hilir untuk mengimbangi agar Bulog tidak rugi dan seharusnya persoalan ini diperhitungkan juga oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah sebenarnya dapat mendesain program yang berorientasi kemandirian kelembagaan pertanian, terutama pada bidang pemasaran. Selama ini, desain kegiatan penyuluhan pertanian lebih banyak terfokus pada subsistem budidaya. Padahal petani Indonesia selama ini telah memiliki keterampilan budidaya yang mumpuni. Hal ini terlihat dari produktivitas pertanian di Indonesia sudah sangat tinggi. Kendala terbesar yang dihadapi petani adalah ketidakmampuan membangun posisi tawar di pasar. Akibatnya, petani hanya sebagai penerima harga di pasaran serta menerima bagian hasil terkecil dari aktivitas pemasaran.

Mengatasi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian untuk Gabah atau Beras. Atas perubahan Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi/HET Beras.

Kelemahan daya saing produk dan komoditas sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu kendala yang harus segera dihadapi guna turut bersaing secara baik di pasar global disamping pasar domestik sendiri. Kelemahan daya saing

Indonesia terjadi karena Indonesia masih mengandalkan produk-produk yang dihasilkan dengan dukungan dan basis sumber daya alam dan tenaga kerja (*keunggulan komparatif*), dan bukan didukung oleh dasar ilmu pengetahuan atau *knowledge-based support*. Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini upaya peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia kurang memperhatikan aspek daya pikir dan kreativitas yang merupakan modal besar dalam peningkatan keuntungan kompetitif.

Hambatan dan masalah yang menjadi ganjalan dalam peningkatan daya saing antara lain adalah kualitas SDM yang masih rendah sehingga menghambat upaya inovasi iptek dan rekayasa social, mekanisme intermediasi iptek atau inovasi yang mampu menjembatani interaksi kapasitas penyedia teknologi dengan kebutuhan pengguna juga masih rendah, budaya masyarakat (pengguna) dalam memanfaatkan inovasi teknologi hortikultura belum sepenuhnya siap, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan belum berpihak sepenuhnya terhadap iptek dan inovasi teknologi pertanian. Selain itu, kegiatan usahatani dan pertanian masih berskala kecil, terpencar-pencar, dan masih berupa kegiatan sampingan.



## BAB II

# KONSEP DAYA SAING

### 2.1. Konsep Daya Saing

**M**engukur daya saing tidak cukup hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga sosial dan kelembagaan. Pengukuran daya saing wilayah seharusnya mengkaitkan antara faktor kualitatif, termasuk modal sosial, dengan sifat-sifat dan proses kuantitatif yang mencakup perdagangan antara perusahaan, peningkatan hak paten, dan pasokan tenaga kerja. Sumber daya saing wilayah dapat berasal dari keadaan geografis yang beragam, mulai dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Dengan demikian mengisolasi pengaruh suatu faktor pada daya saing secara tepat tidak mungkin, masih diperlukan indikator lain untuk menanggapi.

Dalam perspektif ekonomi mikro, di tingkat perusahaan konsep daya saing lebih jelas karena dapat dihubungkan pada kemampuan perusahaan secara konsisten dan berkeuntungan dalam menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar terbuka dari sisi harga, mutu, dan sebagainya (Martin 2004). Sebuah perusahaan harus memenuhi syarat tersebut jika

perusahaan ingin tetap sintas di dalam bisnis, dan semakin kuat daya saingnya serta semakin tinggi daya saing perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain, maka akan lebih besar kemampuan untuk memperoleh pangsa pasar. Sebaliknya bagi perusahaan yang berdaya saing rendah, pangsa pasar akan menurun, dan pada akhirnya perusahaan ini akan bangkrut jika tidak mendapat bantuan atau perlindungan buatan.

Dalam perspektif Ekonomi makro, konsep daya saing lebih tidak jelas dan mengundang banyak tanda tanya. Meskipun ada fakta bahwa peningkatan daya saing suatu negara atau wilayah sering disebut sebagai suatu tujuan utama kebijakan ekonomi, banyak pihak mempertanyakan tentang apa maksud istilah tersebut dan apakah bijaksana untuk membicarakan daya saing pada tingkat ekonomi makro. Ketidakadaan batasan yang dapat diterima semua pihak menjadi sumber penolakan terhadap konsep daya saing ekonomi makro, sehingga akan sangat berbahaya kalau kebijakan ekonomi didasarkan pada suatu konsep khayal yang sarat dengan tafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa pandangan tentang konsep daya saing ekonomi makro menurut para pendukungnya menyepakati bahwa (dalam Martin, 2004) :

“Daya saing suatu bangsa adalah tingkat dimana negara tersebut dalam keadaan pasar bebas dan adil, dapat memproduksi barang-barang dan jasa yang lolos dalam uji daya saing dan pada saat yang sama mempertahankan dan memperluas pendapatan riil warga negaranya. Daya saing di tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas yang lebih baik dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keluaran ke tingkat kegiatan yang lebih tinggi dan selanjutnya dapat membangkitkan tingkat upah riil yang tinggi. Daya saing

terkait dengan baku hidup yang meningkat, kesempatan kerja berkembang, dan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kewajiban internasionalnya. Ia bukan hanya ukuran kemampuan suatu bangsa menjual ke luar negeri, dan mempertahankan keseimbangan perdagangan (*The Report of President's Commission on Competitiveness, 1984*).

“Suatu Negara dikatakan berdaya saing apabila penduduknya dapat menikmati baku hidup yang tinggi dan meningkat dan kesempatan kerjanya selalu tinggi terus menerus. Lebih tepat lagi, tingkat kegiatan ekonomi tidak menyebabkan neraca ekonomi eksternal yang tidak stabil atau tidak mempengaruhi kesejahteraan generasi mendatang” (*European Competitiveness Report, 2000*).

Di dalam literatur ekonomi, terdapat enam mazhab utama teori ekonomi yakni Teori Klasik; Teori Neoklasik; Teori Ekonomi Keynesian; Teori Ekonomi Pembangunan; Teori Ekonomi Pertumbuhan Baru - Teori Pertumbuhan endogen; Teori Perdagangan Baru. Implikasi enam mazhab ini dapat dilihat pada tabel 1;

**Tabel 1.**  
**Implementasi Teori Ekonomi Enam Mazhab (dalam Hutabarat dan Budiman)**

No	Mahzab Teori	Uraian
1	Klasik	Perbedaan teknologi antar bangsa-bangsa dan industri-industri memberi motivasi bagi perdagangan dunia
2	Neoklasik	Peningkatan harga suatu barang akan meningkatkan harga faktor yang digunakan secara instensif dalam

		produksinya dan akan menurunkan harga faktor yang digunakan tidak intensif
3	Ekonomi Keynesian	Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam daur ekonomi dengan berhasil; dengan catatan saatnya harus tepat
4	Ekonomi Pembangunan	Wilayah “pusat” dengan keunggulan produktif awal lebih mungkin mempertahankan keunggulannya daripada wilayah pinggiran yang kurang produktif
5	Ekonomi Pertumbuhan Baru – Teori Pertumbuhan Endogen	Perbedaan produktivitas dan pertumbuhan wilayah dapat disebabkan perbedaan teknologi dan modal manusia
6	Perdagangan Baru	Pengkhususan produksi diperlukan pada tingkat industri/cabang, untuk memungkinkan ekonomi skala internal

## 2.2. Kelemahan Konsep Daya Saing

Konsep-konsep daya saing yang ada tidak mudah ditentukan; penjelasan konsep ini berbeda-beda dan kadangkala bertentangan. Turok (2004 dalam *Borozan 2008*) menunjukkan alasan mengapa beberapa penyebab dan akibatnya dapat diukur, tetapi daya saing itu sendiri tidak. Telah ditunjukkan bahwa daya saing itu sulit, sumir dan dengan demikian membingungkan, yang memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Menurut Porters (1990), apabila suatu Negara menciptakan lingkungan bisnis dimana timbul keadaan bisnis yang mendukung dan dimana negara memberikan bantuan tertinggi bagi perusahaan yang berkiprah di pasar lokal dan

dunia, keadaan-keadaan ini memberikan keunggulan kompetitif bangsa itu. Namun, Krugman (1994) tidak sependapat dengan Porter (1990): “Gagasan bahwa kinerja kesejahteraan dan ekonomi suatu negara tergantung pada keberhasilan pasar dunia, adalah suatu hipotesis dan tidak serta merta menggambarkan kebenaran. Selain itu pandangan praktis dan empiris membuktikan hipotesis ini sama sekali salah”. Krugman (1994) percaya bahwa bangsa-bangsa yang menonjol di dunia, tidak bersaing satu sama lain dan tidak ada tanda-tanda persaingan nyata diantara mereka.

Persoalannya adalah meskipun pengertian daya saing sangat bermakna bagi sebuah perusahaan, tetapi konsep ini bila dibawa ke tingkat perekonomian nasional: “daya saing adalah suatu kata yang tidak mempunyai arti apabila diterapkan untuk ekonomi nasional. Dorongan yang berasal dari daya saing salah dan berbahaya” (Krugman, 1994). Cellini dan Soci (2002) mencari pemikiran Krugman dalam dua butir utama: (i) konsep daya saing nasional adalah khayalan karena negara-negara tidak memiliki titik akhir, dan tidak seperti perusahaan, tidak bangkrut dan tidak peduli apakah mereka puas, atau tidak dengan kinerja ekonominya; (ii) perdagangan internasional bukanlah permainan yang saling mengalahkan.

Berdasarkan pandangan ini daerah-daerah miskin tidak mungkin dapat berdaya saing, padahal daya saing adalah istilah berdimensi ganda yang seharusnya dipertimbangkan seiring dengan waktu. Seseorang sebaiknya mempertimbangkan potensi beberapa wilayah atau suatu organisasi untuk berkinerja baik dalam istilah ekonomi dan lainnya. Dengan pandangan yang terakhir ini tersirat dimensi waktu dan kepentingan strategis dari daya saing.

Oleh karena itu Krugman (1994) berfikir bahwa pengertian daya saing tidak diperlukan sama sekali dan pengertian daya saing suatu bangsa atau wilayah tidak sesederhana daya saing perusahaan: “Daya saing bukanlah pernyataan yang mempunyai arti. Pendapat bahwa negara-negara adalah sama dengan perusahaan dan bahwa mereka bersaing antar sesamanya di suatu pasar adalah suatu mimpi yang sempurna (Maskel dan Eskellin, 1998 dalam Vukovic et al, 2012). Namun meskipun negara atau wilayah tidak mempunyai ciri-ciri seperti perusahaan, tingkat persaingan tertentu antar mereka ada dan banyak penulis bermaksud untuk menguji bentuk dan ciri-cirinya. Poot (2000 dalam Vukovic, 2012) menyebutkan bahwa daya saing suatu wilayah memberikan suatu ukuran potensinya dalam mencapai pertumbuhan taraf hidup lestari bagi semua penduduknya.

Pemeringkatan daya saing antar negara sesungguhnya mengandung kelemahan dan kesesatan, karena tatanan pembangunan antar negara berbeda-beda dan daya saing itu erat kaitannya dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, hukum dan budaya, maka arah dan pemaknaan, indeks daya saing seharusnya juga dipertimbangkan. Bagi negara maju misalnya, daya saing itu seharusnya lebih diarahkan pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi, dengan cara antara lain pengembangan teknologi dan pembaharuan kegiatan industri dan jasa. Namun karena *level playing field* harus sama, mereka memberikan indeks daya saing di tingkat pengembangan yang rendah bagi negara-negara berkembang,

Salah satu kelemahan definisi daya saing suatu bangsa adalah apabila dikaitkan dengan produktivitas. Dua istilah ini berbeda. Suatu negara kadangkala dapat meningkatkan daya

saingnya dengan mengubah strategi (seperti perlindungan dagang, devaluasi mata uang), tanpa peningkatan produktivitas. Produktivitas mengacu pada kemampuan internal suatu organisasi, sementara daya saing mengacu pada posisi relatif suatu organisasi terhadap pesaingnya. Point penting dalam membatasi daya saing suatu bangsa adalah bahwa ia mempunyai arti diantara bangsa-bangsa yang memiliki keunggulan komparatif yang sama dan bersaing di industri yang sama. Pernyataan secara umum bahwa Indonesia kurang bersaing dengan Korea, tidaklah bermakna karena kedua negara ini mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda.

### **2.3. Kelemahan Konsep Daya Saing Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian**

Kelemahan daya saing produk dan komoditas pertanian di Indonesia merupakan salah satu kendala yang harus segera diatasi guna turut bersaing secara baik di pasar global, di samping dalam pasar domestik sendiri. Kelemahan daya saing Indonesia terjadi karena bangsa Indonesia masih mengandalkan produk-produk yang dihasilkan dengan dukungan dan basis sumber daya alam dan tenaga kerja (keunggulan komparatif) dan bukan didukung oleh dasar ilmu pengetahuan atau *knowledge-based support*. Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini upaya peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia kurang memperhatikan aspek daya pikir dan kreativitas yang merupakan modal besar dalam peningkatan keuntungan kompetitif.

Hambatan dan masalah yang menjadi ganjalan alam peningkatan daya saing antara lain adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah sehingga menghambat

upaya inovasi iptek dan rekayasa sosial, mekanisme intermediasi iptek atau inovasi yang mampu menjembatani interaksi kapasitas penyedia teknologi dengan kebutuhan pengguna juga masih rendah, budaya masyarakat (pengguna) dalam memanfaatkan inovasi teknologi hortikultura belum sepenuhnya siap, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan belum berpihak sepenuhnya terhadap iptek dan inovasi teknologi pertanian. Selain itu kegiatan usaha tani dan pertanian masih berskala kecil, terpencar-pencar, dan masih berupa kegiatan sampingan.

Pada akhir-akhir ini muncul suatu paradigma baru dimana pertanian dipandang memiliki kapasitas untuk membantu mencapai beberapa dimensi pembangunan penting, khususnya percepatan pertumbuhan PDB di tahap-tahap awal pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pencegahan kerapuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan pendapatan pedesaan dan perkotaan, pelepasan sumberdaya terbatas seperti air dan lahan untuk sektor-sektor lainnya, dan memberikan jasa lingkungan yang berlipat-ganda. Ini merupakan akibat dari krisis pada tahun 2000-an, seperti: Ketahanan pangan dan kelaparan yang semakin rapuh; Kemandekan pertanian di Anak-Shara Afrika yang berkelanjutan; Kemiskinan dunia yang pada umumnya di pedesaan; Kesenjangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan yang semakin meningkat; Kelangkaan sumberdaya yang semakin meningkat karena penggunaan yang berlebihan dan ketidak-tepatan penggunaan di bidang pertanian dan keterbatasan pengadaan jasa-jasa lingkungan. Namun, pembangunan ekonomi melalui jalan pengembangan baru pertanian tetapi masih tidak lengkap, tidak seimbang dengan pernyataan retorika politik. Kinerja pertanian yang buruk dalam



pembangunan dapat dikaitkan khususnya dengan investasi yang rendah dan tidak tepat di pertanian yang terjadi terus menerus oleh Sebagian besar pemerintah dan donor sejagat. Mudah-mudahan kesadaran ini dapat merasuk kedalam hati sanubari para pembuat keputusan pembangunan dan perdagangan pertanian di tingkat multilateral, wilayah dan bilateral.

Berfikir dan berbicara tentang daya saing mempunyai tiga macam ancaman (Krugman, 1994): (i) ia dapat menyebabkan pemborosan anggaran belanja pemerintah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan daya saing negeri; (ii) ia mungkin mendorong pengalokasian sumberdaya yang salah; (iii) ia juga dapat mengarahkan ke sikap perlindungan dan perang dagang; dan dampak semua itu yang terpenting adalah ia dapat menghasilkan kebijakan publik yang buruk dalam rangkaian penanganan isu-isu penting.

Analisis Gallagher (2013) menemukan bahwa politik perdagangan abad ke-21 dicirikan oleh suatu benturan kesejagatan atau *clash of globalizations*; seperti kendala kebijakan pada *Putaran Uruguay* dan juga pembatasan-pembatasan yang dibuat AS atas kemampuan Negara-negara berkembang untuk menggunakan strategi-strategi pembangunan untuk mencapai kemapanan dan pertumbuhan. Di pihak lain, diantara Negara-negara berkembang semakin tumbuh pendapat bahwa mereka pada saat ini komoditas primer dan industri ringan, dan untuk dikembangkan menjadi industri baru intensif bernilai tambah dan berkeunggulan di kemudian hari. Oleh karena itu Gallagher (2013) menyimpulkan bahwa kedigdayaan ekonomi bukanlah satu-satunya factor yang menyebabkan perubahan kebijakan perdagangan sejagat, seperti *Putaran Uruguay*, meskipun ia merupakan kuncinya. Faktor-faktor lain

adalah struktur kelembagaan, politik dalam negeri, gejolak mata uang dan gagasan atas kesejahteraan.

Usaha peningkatan daya saing produk dan komoditas sektor pertanian selanjutnya harus menjadi arus utama kebijakan pemerintah dan kiprah dunia usaha dan industri. Kebijakan pemerintah seyogyanya disusun bersama dunia usaha pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam membangun sistem inovasi sistemik berkelanjutan. Peningkatan daya saing produk dan komoditas pertanian harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi sektor pertanian, sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional secara berencana, bertahap dan berjenjang.

Dalam kaitannya dengan peningkatan produksi pangan, termasuk pangan olahan, diperlukan pengendalian yang baik dan terarah agar tidak terjadi *imperialisme* pangan olahan impor yang memasuki pasar nasional dengan strategi *franchise*. Dalam hal ini kontinuitas pasokan bahan olahan harus terjamin, dilaksanakan secara terintegrasi dari kegiatan hilir (produksi) sampai industri hulu. Kesemuanya membutuhkan dukungan berbagai program pengembangan produksi komoditas guna mendukung industri pangan olahan yang mencakup program ekstensifikasi dan intensifikasi produksi, termasuk rekayasa genetik, penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan toleran hama/penyakit utama, serta efisiensi usaha tani dan biaya produksi industri pangan olahan.

Di sisi lain daya saing komoditas pertanian juga berkaitan erat dengan daya saing daerah yang dapat mendukung komoditas pertanian unggulan tertentu yang bersifat spesifik lokasi. Lokasi geopolitik strategis antara lain dimiliki Pulau

Jawa dan daerah yang dekat dengan semenanjung Malaysia an Singapura. Wilayah tersebut memiliki daya saing daerah yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di tanah air. Selain itu kelapa sawit dan karet yang terkonsentrasikan di Sumatera dan Kalimantan, serta kako di Sulawesi, memiliki keuntungan tersendiri dalam hal daya saing internasional. Di sisi lain Pulau Jawa mendominasi komoditi pangan dan hortikultura yang mampu memasok pasar domestik. Komoditi peternakan yang semula banyak dihasilkan di wilayah timur juga tergeser ke Pulau Jawa. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa upaya meningkatkan daya saing komoditas dan produk pertanian harus didukung melalui peningkatan daya saing daerah berupa pengembangan dan peningkatan mutu dan kuantitas infrastruktur, baik infrastruktur fisik transportasi, maupun infrastruktur kelembagaan, termasuk lembaga-lembaga keuangan, serta upaya pendidikan sistematis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa upaya penelitian akhir-akhir ini yang menyoroti korelasi antara pemeringkatan Negara-negara dan pertumbuhan ekonomi mereka mendapatkan bahwa hubungan ini tidak ditemukan (berger dan Bristow 2009: Ochel an Rohn 2006). Berger dan Bristow (2009) menyimpulkan indeks-indeks itu tidak mempunyai pendekatan bersama dan merupakan penduga kinerja ekonomi buruk. Reinert (1995) yang menganalisis teori persaingan selama 500 tahun, mengamati bahwa kritik Krugman terhadap daya saing dan ekonomi neoklasik dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa daya saing tidak mempunyai arti jika diandalkan perusahaan yang mewakili dengan informasi sempurna dan tidak ada pengaruh skala sebagaimana dilakukan teori neoklasik pada umumnya.

Gagasan daya saing dalam pengikut pemikiran ini adalah Negara-negara meningkatkan baku hidup mereka melalui kegiatan bersaing dengan Negara lain. Ini bertentangan dengan model neoklasik baku dimana teknologi produksi Bersama dan pasar bersaing menggerakkan dunia ke arah suatu keseimbangan persaingan Pareo-optimal. Jelaslah analisis yang ada tentang daya saing tidak menghasilkan banyak manfaat bagi analisis kebijakan, meskipun pembuat kebijakan terus menerus tertarik pada daya saing sebagai dasar dan alasan untuk melakukan perubahan kebijakan.

Fakta yang terjadi adalah peningkatan pemilahan tenaga kerja secara internasional yang semakin meningkat disertai dengan peningkatan kesenjangan pendapatan antara Negara-negara miskin dan kaya, dengan arus perdagangan diantara keduanya kecil sekali. Jadi, meskipun indikator-indikator komposit, seperti indeks daya saing mampu memdaukan jumlah informasi yang sangat besar menjadi format yang mudah dimengerti dan bernilai sebagai alat komunikasi dan politik, dimana seseorang dapat memperbandingkan dan memeringkat Negara-negara dalam perkara daya saing industri, pembangunan lestari, kesejagatan dan inovasi, mereka mengidap banyak kesulitan metodologis yang berakibat mereka dapat menyesatkan dan mudah dimanipulasi.

Di dalam teori perdagangan bebas berfungsi mengoptimalkan pengalokasian sumberdaya di bawah beberapa andalan sederhana ketat (dan biasanya tidak realistis) semacam persaingan sempurna dengan beberapa pasar, produk sejenis, akses universal ke teknologi (dengan tanpa biaya belajar), dan tidak ada eksternalitas atau ekonomi skala. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi manakala ada kegagalan pasar, maka

## 2.4. Kinerja Daya Saing Komoditas Pangan

Mayoritas penduduk Indonesia menempati wilayah pedesaan dan hidupnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini menghasilkan komoditas yang memiliki keberagaman yang tinggi, baik dalam sisi kuantitas (jumlah produk, jenis komoditas, dan produk), maupun dalam hal kualitas. Namun demikian, keberagaman tersebut dapat berpotensi menjadi tantangan bagi sektor ini.

Daya saing mengindikasikan kemampuan dan kinerja suatu perusahaan, sub-sektor, wilayah atau negara untuk menjual dan memasok barang dan jasa di pasar secara lebih baik dibanding kemampuan perusahaan, subsektor, atau negara lain di pasar yang sama. Selain itu, daya saing pada sektor ini juga dilihat dari kemampuan menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional.

Daya saing erat kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM) yang secara langsung berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang diakumulasi dalam proses pembelajaran. Konsep dan sikap daya saing berasal dan berkembang dalam budaya kelembagaan koorporasi yang mendorong snpsirasi untuk selanjutnya diimplementasikan di lingkungan yang tepat. Daya saiang berkembang dalam suasana lingkungan yang kondusif dan berjiwa kompetitif (Annete, 2008). Budaya kompetitif positif merupakan salah satu ciri masyarakat egaliter yang tidak membatasi perkembangan pikiran atau gagasan dan Tindakan eksperimentatif guna menentukan masa depan yang lebih baik.

## 2.5. Struktur Pengembangan Daya Saing



**Gambar 3. Daya Saing dan Faktor-Faktor Utama Penentu**  
(Man, at all. 2002)

Salah satu hambatan utama untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi adalah lemahnya bangunan kelembagaan kemitraan agribisnis terutama yang dijalankan oleh dan di masyarakat pedesaan. Dewasa ini sebagian pelaku agribisnis adalah petani di pedesaan dan hamper semuanya merupakan kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola usaha keluarga. Kemitraan usaha yang menonjol di tingkat desa adalah kemitraan horizontal, antara lain berupa kerja sama kelompok tani, sedangkan hubungan buruh-majikan atau bapak-anak angkat.

Peran kemitraan usaha adalah pada kemampuan kerja sama yang lebih teratur dan terarah, sehingga pengembangan sistem agribisnis mempunyai daya guna yang lebih tinggi dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku-pelaku agribisnis di pedesaan, Dihasilkannya produk pertanian

berdaya saing tinggi, dapat dipandang sebagai interaksi sinergis dari komponen budaya material, peran kewirausahaan dan kelembagaan (kemitraan yang terbangun dengan baik). Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan sangat rapuh dan hal itu tercermin dari posisi pelaku ekonomi yang tidak “memiliki” kekuatan memadai untuk melakukan *bargaining position* tersebut disebabkan oleh banyak factor antara lain kelemahan dalam pengoperasian kelompok tani, penugasan permodalan usaha, interdependensi yang sangat timpang antar pelaku ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan.

Pola organisasi kemitraan yang ada dewasa ini, yaitu program pemerintah (inti-plasma), tradisional (*patron client*) dan pasar (rasional) masih menempatkan petani pada posisi tereksplorasi secara sangat tidak adil. Pola pemerintah menunjukkan terlalu dominannya intervensi pemerintah dan pada umumnya menempatkan plasma pada posisi yang lemah. Pola tradisional sulit menumbuhkan semangat dan kreativitas serta mengembangkan diri, sedangkan pola pasar menyebabkan besarnya ketergantungan petani terhadap usahawan dan dapat menimbulkan konglomerasi. Bagi pengembangan agribisnis “kecil” masalah yang sering dihadapi terutama adalah ketidakseimbangan rebut tawar (*bargaining position*) dan adanya intransparansi bisnis. Oleh karena itu peran pemerintah selain sebagai regulator dan pemberi insentif, juga perlu diarahkan untuk membantu pengembangan kegiatan kemitraan usaha agribisnis kecil.

Karakteristik usaha tani di Indonesia dicirikan oleh sifat usaha skala kecil dikelola secara independent dan menyebar dalam Kawasan yang luas (*dispersal*) . Konsekuensinya adalah volume produksi terbatas, kualitas produk dan waktu panen

bervariasi serta biaya pengumpulan produk relative besar sehingga kurang kondusif bagi pengembangan agroindustri dan sistem pemasaran yang efisien. Dampak integratifnya adalah tingginya biaya pemasaran sehingga akan menekan pangsa harga yang diterima petani dan mengangkat tingkat harga yang dibayar konsumen. Akibatnya adalah permintaan dan penawaran produk usaha tani akan menurun, sehingga menghambat perkembangan agribisnis.



## BAB III

# PERMASALAHAN

Sektor pertanian nasional menghasilkan komoditas dan produk yang memiliki keragaman tinggi, baik dalam kuantitas (jumlah produksi, jenis komoditas dan produk), maupun dalam hal kualitas. Tetapi keragaman tersebut dapat dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan daya saing sektor melalui seleksi jenis komoditas dan produk yang mampu bersaing di pasar global. Karena daya saing sektor pada umumnya memiliki dimensi vertikal (eksternal) dan horisontal (kekuatan lingkungan strategis, khususnya lingkungan usaha, maka konsep daya saing dapat digunakan untuk menyeleksi peluang berkompetisi atau peluang ekspor untuk komoditas-komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Daya saing tidak hanya memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas dan kinerja bidang pertanian namun juga berdampak negatif atau permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat daya saing dapat dirasakan oleh para petani sebagai berikut:

### 3.1. Produktivitas

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. (Mangkuprawira, 2007).

Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola misalnya padi, selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya (Ramalia, 2011). Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi (Melgiana, 2013). Teknologi diukur melalui penggunaan bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi, karena keberhasilan kinerja individu petani sangat berpengaruh terhadap hasil kerja pertanian (Yuni, 2013).

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani (Lilis, 2009).

Meski memiliki peran yang sangat vital, namun pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian nasional terus mengalami penurunan. Selain itu, serapan tenaga kerja sektor tersebut juga terus merosot. Setidaknya ada tiga permasalahan utama yang dialami sektor pertanian nasional saat ini,

---

permasalahan tersebut antara lain adalah produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga.

Masalah produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan impor. Sementara itu, permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja, permasalahan pun terjadi dalam hal keterjangkauan harga. Hasil penelitian menyatakan struktur pasar produk pertanian dikuasai oleh beberapa pelaku utama saja. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

### **3.2. Kualitas**

Peningkatan daya saing itu bisa melalui perbaikan kemampuan petani untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dengan metode se-efisien mungkin dan dalam jumlah yang mencukupi. Perbaikan ini bisa dilakukan baik dengan meningkatkan kemampuan individu atau pengetahuan petani melalui perbaikan sumber daya manusia yang memang digagas pemerintah dan adopsi dengan teknologi.

Daya saing hortikultura Indonesia juga masih lemah karena selain kualitasnya kalah bersaing dengan produk impor, juga karena kelemahan sumber daya manusia dan budaya yang belum bisa untuk menggunakan inovasi teknologi pendorong produksi hortikultura. Usahatani hortikultura juga belum dilakukan secara komersial, namun masih terpencar-pencar, dilakukan sebagai kegiatan sampingan, dan kebijakan pemerintah

belum sepenuhnya berpihak kepada petani hortikultura. Preferensi konsumen produk hortikultura termasuk buah dan sayuran belum sepenuhnya dipertimbangkan untuk memperkuat kemampuan daya saing.

Rendahnya kualitas produk pertanian pada saat ini dapat disebabkan oleh penanganan mulai dari kegiatan pra panen hingga panen masih belum intensif. Selain itu, rendahnya kualitas produk pertanian juga dapat disebabkan oleh kegiatan pasca panen yang belum dilakukan dengan baik. Dimana kegiatan pasca panen terhadap produk pertanian dapat dilakukan melalui standarisasi dan *grading*.

- Standarisasi merupakan kegiatan yang meliputi penetapan standar untuk produk, pengolahan produk dalam rangka menetapkan standar-standar yang sesuai dan melakukan tindakan pengorganisasian sesuai dengan standar apabila diperlukan (Assauri, 1987). Apabila produk mempunyai kualitas, ukuran dan jenis yang seragam serta nilai, ciri-ciri sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka konsumen dapat membeli produk tersebut dengan kepercayaan bahwa produk itu sesuai dengan kebutuhannya.
- *Grading* ditujukan untuk menghilangkan keperluan inspeksi, mengurangi praktik kecurangan, dan mempercepat proses jual beli.

Sehingga, kedua kegiatan tersebut ditujukan agar dapat melindungi produk dari kerusakan serta berupaya meminimalisir biaya penyimpanan dan biaya angkut.

Namun, masalahnya adalah kedua kegiatan tersebut cukup sulit dilakukan pada produk pertanian. Dimana menurut Soekartawi (1989), produk pertanian memiliki karakteristik (1)

---

bersifat musiman dan tidak dapat memprediksi kuantitas hasil dengan cepat, (2) bersifat *bulky* yaitu bervolume besar tapi nilai relatif kecil, sehingga membutuhkan media penyimpanan yang luas dan pengiriman yang relatif besar, (3) bersifat segar dan mudah rusak, (4) rentan terserang hama dan penyakit, (5) rawan terhadap bencana atau gangguan seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain. Sehingga, kemungkinan besar kualitas produk dapat menurun pada saat sampai pada tempat tujuan. Penurunan kualitas tersebut dapat disebabkan kerna proses penyimpanan, penanganan, dan pengangkutan yang tidak baik. Akibatnya, produk yang telah diklasifikasikan berdasarkan kualitas yang sesuai dengan permintaan dapat berubah dan ditolak atau dibeli dengan harga yang lebih murah.

### 3.3. Skala Usaha

Daya saing sektor pertanian merupakan syarat untuk mengambil manfaat dari perdagangan. Peningkatan daya saing pertanian tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan usaha tani karena sektor pertanian. Indonesia didominasi oleh kegiatan budidaya yang dilakukan dalam unit-unit skala kecil, tidak efisien, rendahnya produktifitas, peningkatan nilai tambah rendah dan kinerja perdagangan rendah.

Karakteristik usaha tani di Indonesia dicirikan oleh sifat usaha skala kecil dikelola secara independent dan menyebar dalam kawasan yang luas (*dispersal*) . Konsekuensinya adalah volume produksi terbatas, kualitas produk dan waktu panen bervariasi serta biaya pengumpulan produk relative besar sehingga kurang kondusif bagi pengembangan agroindustri dan sistem pemasaran yang efisien. Dampak integratifnya adalah

tingginya biaya pemasaran sehingga akan menekan pangsa harga yang diterima petani dan mengangkat tingkat harga yang dibayar konsumen. Akibatnya adalah permintaan dan penawaran produk usaha tani akan menurun, sehingga menghambat perkembangan agribisnis.

Sampai saat ini belum adanya suatu rumusan yang secara ringkas dan tegas dapat menjelaskan definisi petani kecil (pertanian skala kecil). Lazimnya definisi petani kecil yang selama ini banyak diacu terkait dengan *smallness* dari *size* lahan usahatani dan atau jumlah ternak yang dimiliki atau dikelola (von Braun, 2004). Salah satu bentuk keterbatasan pendefinisian seperti itu adalah tidak adanya suatu ukuran yang dapat berlaku umum (untuk semua wilayah dan jenis komoditas). Untuk luas usahatani yang sama, petani tanaman pangan seperti pada umumnya tentulah tidak sebanding dengan petani yang memproduksi komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dengan akses pasar modern yang sangat baik. Dengan luas garapan yang sama, petani yang lahan usahatannya sangat subur dan berpengairan teknis yang canggih adalah berbeda dengan petani yang lahan usahatannya tidak terfasilitasi pengairan yang memadai dan kualitas kesuburannya rata-rata.

Alternatif lain yang ditempuh untuk mendefinisikan petani kecil adalah dari sudut pandang tenaga kerja dan pendapatan. Dari sudut pandang tenaga kerja, petani kecil adalah rumah tangga yang mata pencahariannya utamanya berusahatani dan alam usahatannya tersebut mayoritas tenaganya adalah tenaga kerja dalam keluarga (Narayana and Gulati, 2002). Dari sudut pendapatan, petani kecil umumnya diasosiasikan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Secara teoritis memang terdapat konvergensi antara skala usaha-

penggunaan tenaga kerja upahan-penerapan teknologi-akses pasar-pendapatan, namun sampai saat ini data yang diperlukan untuk itu belum tersedia sehingga dengan segala keterbatasannya, yang umum dipergunakan masih mengacu pada skala usaha.

Pengertian mengenai skala usaha mengacu pada konsep *return to scale*. Selama ini konsep tersebut telah banyak diterapkan sebagai pendekatan teoritis mengenai skala optimal usahatani (Chavas, 2001). Penerapannya dalam studi empiris menghasilkan beragam kesimpulan.

Di Indonesia studi tentang hubungan antara skala usaha dengan efisiensi juga telah banyak dilakukan (Paruh kedua dekade 70-an – paruh awal dekade 90-an), baik melalui pendekatan ekonometrik maupun akunting sederhana. Namun terkait dengan kurangnya tindak lanjut konkrit dari rekomendasi kebijakan yang disampaikan maupun “isu-isu kebijakan” yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam paradigma pembangunan maka sejak awal dekade 90-an, studi seperti itu jarang dilakukan. Padahal terkait dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dalam kelembagaan pengelolaan usahatani mungkin saat ini kondisinya berbeda. Secara umum hasil-hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa usahatani pangan di Indonesia berada dalam kondisi *constant returns to scale*, dan mungkin terkait dengan itu pula maka sampai saat ini konsolidasi usahatani secara mandiri oleh petani belum menjadi trend.

Kesimpulan umum mengenai berbagai hasil analisis menunjukkan bahwa berbekal keunggulan masing-masing pertanian skala kecil maupun skala besar akan terus eksis. Baik

yang besar maupun kecil akan mengalami pasang surut dan dinamika lingkungan strategis global akan mempengaruhi eksistensinya masing-masing. Namun demikian, satu hal penting yang harus digarisbawahi adalah bahwa pasang surut pertanian skala kecil di negara-negara berkembang berimplikasi lebih serius terhadap perekonomian sebagian besar negara-negara berkembang karena berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, ketahanan pangan, dan kesempatan kerja sebagian besar penduduknya.

Lemahnya daya saing sektor pertanian berkaitan dengan karakter daya saing pertanian yang berkaitan dengan pertanian rakyat dengan skal kecil (petani gurem). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbdan hukum atau jenis usaha pertanian lainnya. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia hasil Sensus Tani Tahun 2013 tercatat sebanyak 26,14 juta rumah tangga. Jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai kurang dari 0,10 Ha (1.000 m<sup>2</sup>) adalah sebesar 4,34 juta rumah tangga. Rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai antara 0,0 – 0,19 Ha (1.000 m<sup>2</sup>) pada tahun 2013 adalah sebanyak 3,55 juta rumah tangga. Usaha tani skala kecil ini memiliki produktivitas rendah dan lemah akses terhadap Teknik pertanian yang baik, sistem budidaya dan teknologi modern, selain adanya masalah efisiensi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia (Arifin, 2013).



### 3.4. Akses Petani Terhadap Teknologi dan Pasar

Mengapa petani selalu dalam posisi dirugikan ketika harga komoditi anjlok? Mengapa petani masih saja menggunakan pola “*latah*” dalam usaha tani mereka? Mengapa petani masih sering mengalami kendala dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman? Mengapa petani belum mampu menjaga kontinuitas produksi?. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering muncul saat kita “*turun*” ke lapangan dan mendengar keluhan-keluhan petani, terkait dengan usaha tani yang mereka jalankan selama ini, khususnya tentang lemahnya posisi petani dalam penentuan harga komoditi pertanian yang mereka hasilkan. Kondisi seperti itu terus berlanjut dari waktu ke waktu, seakan begitu sulit mengurai benang kusut permasalahan “*klasik*” yang sering dihadapi para petani kita.

Petani saat ini juga seharusnya mampu mengakses sistem informasi pemasaran pertanian yang handal. Kenyataannya, sebagian besar petani di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem informasi pasar yang bersifat tradisional, baik dengan mendengar keterangan dari petani sekitar maupun berdasarkan pengalaman musim sebelumnya. Sistem informasi tersebut sudah tidak lagi dapat diandalkan karena tingkat keakuratannya rendah maupun keterlambatan informasi tersebut. Padahal keadaan di pasar cepat sekali berubah sehingga respon petani tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Petani perlu didorong untuk melek teknologi sehingga mampu memanfaatkannya untuk mengakses informasi pasar, terutama terkait kebutuhan konsumen dan harga jual produk. Namun, konsep ini juga harus diikuti dengan peningkatan

keterampilan petani dalam menggunakan alat dan media informasi.

Permasalahan yang umum terjadi dalam proses adopsi inovasi pertanian adalah lambatnya adopsi teknologi oleh petani yang disebabkan oleh: (a) Sulitnya informasi sampai ke petani karena infrastruktur yang terbatas; (b) Petani tidak memahami informasi yang diterimanya, karena media penyampaian informasi kurang sesuai dengan materi yang disampaikan dan karakteristik petani; (c) Meskipun informasi mengenai inovasi dapat dimengerti, namun sulit untuk menerapkannya karena keterbatasan sumber daya yang tersedia; (d) Petani belum melihat manfaat dan dampak yang secara langsung menguntungkan dari inovasi yang diintroduksi; (e) Sifat petani yang diterimanya, karena media penyampaian informasi kurang sesuai dengan materi yang disampaikan dan karakteristik petani; (f) Meskipun informasi mengenai inovasi dapat dimengerti, namun sulit untuk menerapkannya karena keterbatasan sumber daya yang tersedia; (g) Petani belum melihat manfaat dan dampak yang secara langsung menguntungkan dari inovasi yang diintroduksi; (h) Sifat petani yang cenderung tidak mau ambil resiko dalam menerapkan inovasi yang belum mereka kenal sebelumnya; dan (i) Tidak mudah mengubah perilaku petani yang berkaitan dengan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. Upaya untuk mengembangkan mekanisme komunikasi inovasi pertanian yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan untuk mempercepat proses adopsi inovasi pertanian melalui pembentukan lembaga pemadu sistem komunikasi inovasi pertanian dan pengembangan sistem jaringan informasi.

Salah satu penyebab petani terkadang mengalami kerugian akibat merosotnya harga komoditi pertanian yang mereka usahakan, adalah minimnya informasi yang mau dan mampu diakses oleh para petani. Setiap komoditi pertanian memiliki syarat tumbuh pada kondisi tanah, elevasi dan agroklimat tertentu. Itulah sebabnya kemudian muncul wilayah-wilayah yang disebut sentra produksi, di mana komoditi tersebut menjadi komoditi utama yang diusahakan oleh para petani di wilayah itu.

Komoditi kentang misalnya, menghendaki syarat tumbuh pada jenis dan tekstur tanah yang gembur dan subur, berada di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kelembapan tanah sedang. Sesuai dengan syarat tumbuh tersebut, kemudian yang muncul sebagai daerah sentra produksi kentang adalah wilayah-wilayah dataran tinggi seperti Dieng di Jawa Tengah, Pengalengan di Jawa Barat, Berastagi di Sumatera Utara dan Dataran Tinggi Gayo di Aceh.

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi petani untuk mengakses informasi tersebut. Jaringan internet yang sudah menjangkau hampir semua pelosok daerah, sangat membantu para petani untuk mengakses informasi dari luar. Hanya yang jadi masalah, sampai dengan saat ini masih sangat sedikit petani yang mau dan mampu mengakses informasi tersebut untuk mendukung aktifitas usaha tani mereka.

Padahal, kalau para petani mau mengakses informasi tersebut, mereka akan dapat membuat perencanaan usaha tani dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut luas tanam yang akan mereka usahakan maupun jadwal dan pola tanam yang akan

mereka lakukan. Dengan demikian, pada saat mereka memasuki masa panen, tidak ada kesulitan bagi mereka untuk memasarkan produk pertanian yang mereka hasilkan.

Akses informasi juga memungkinkan para petani dapat menjalin kerjasama langsung dengan para pelaku usaha di kota-kota besar tersebut, bahkan dapat menjalin kerjasama dengan para eksportir, sehingga harga jual yang mereka dapatkan akan jauh lebih meningkat, dibandingkan dengan menjual produk mereka melalui pedagang pengumpul mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Rantai perdagangan komoditi pertanian yang terlalu panjang itulah yang bisa menjadi salah satu penyebab harga jual yang diperoleh petani menjadi tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah mereka keluarkan. Dan ini terjadi pada hampir semua komoditi pertanian, utamanya komoditi hortikultura seperti Cabe, Tomat, Bawang Merah, Kol, Wortel dan lain-lainnya.

Selain masalah pemasaran hasil pertanian, teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi tentang teknologi budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman, peningkatan kualitas produk pertanian, dan informasi penting lainnya yang sangat bermanfaat untuk menunjang aktifitas usaha tani. Selain itu, kemampuan petani mengakses informasi, juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk-produk pertanian yang sudah mereka hasilkan, potensi yang dimiliki oleh kelompok tani, bahkan menjadikan areal pertanian mereka sebagai destinasi wisata agro, yang kesemuanya akan bermuara pada peningkatan pendapatan petani.

Kesimpulannya, di era globalisasi seperti saat ini, akses informasi juga menjadi salah satu penentu dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang tidak bisa ditawar lagi, dan semua pihak harus peduli dengan ini. Karena kita tentunya tidak ingin mendengar lagi keluhan petani karena cabe, tomat, kentang, bawang merah, kol dan komoditi lain yang mereka usahakan selama ini, harganya selalu mengalami fluktuasi yang berdampak pada kerugian petani. Selain aspek budidaya, akses informasi akan menjadi bagian dari solusi yang dihadapi petani selama ini.

Kendala utama dalam menerapkan konsep ini adalah usia sebagian besar petani yang sudah lanjut dan tingkat pendidikan yang rendah. Stakeholders dapat menyusun berbagai program pengenalan teknologi informasi dan komunikasi utamanya kepada pemuda tani di pedesaan. Nantinya, para pemuda tani tersebut diwajibkan untuk mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada petani lain sehingga proses alih teknologi berlangsung secara cepat dan tepat.

### **3.5. Belum Berkembangnya Produksi Pangan Fungsional**

Masyarakat masa kini mulai menyadari bahwasanya makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemuas selera, ataupun penguang perut saja, kini masyarakat mulai menilai makanan dari aspek gizi, dan fisiologisnya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam mengembangkan pangan fungsional untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pemilihan pangan fungsional sebagai konsumsi sehari-hari adalah pilihan tepat untuk mempertahankan status kesehatan. Hingga akhirnya,

sampailah kita pada sebuah pertanyaan, “*Sejatinya, apa yang dimaksud dengan pangan fungsional?*”

Pangan fungsional merupakan pangan yang dapat disajikan, serta dikonsumsi sehari-hari sebagai menu/diet yang memenuhi standar mutu, persyaratan keamanan, standar persyaratan lain, dan memiliki karakteristik sensoris yang sama seperti makanan pada umumnya, seperti penampakan, meliputi warna, tekstur, ukuran, konsistensi, serta cita rasa yang dapat diterima konsumen (*Acceptable*).

Pangan fungsional ialah pangan yang dapat menguntungkan salah satu atau lebih dari target fungsi-fungsi dalam tubuh seperti halnya nutrisi yang dapat memperkuat mekanisme pertahanan tubuh dan menurunkan risiko dari suatu penyakit. Di banyak negara, konsep pangan fungsional telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dilandasi beberapa alasan, yaitu (i) meningkatnya kesadaran akan pentingnya makanan dalam pencegahan atau penyembuhan penyakit, (ii) tuntutan konsumen akan adanya makanan yang memiliki sifat lebih, yaitu memiliki kandungan ingredient fungsional, (iii) pengalaman masyarakat mengenai *alternative medicine*, (iv) studi epidemiologi mengenai prevalensi penyakit tertentu yang ternyata dipengaruhi kebiasaan makan dan bahan yang dimakan suatu populasi. Produk makanan dan susu bayi dan balita saat ini telah banyak yang diperkaya dengan prebiotik untuk lebih meningkatkan kualitas nutrisi dan menjaga kesehatan bayi dan balita.

Pengembangan pangan fungsional di suatu negara tidak saja menguntungkan bagi konsumen karena manfaat yang dapat diambil, tetapi juga merupakan peluang bagi industri pangan dan

kuntungan bagi pemerintah. Kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi konsumen merupakan satu faktor krusial dalam pengembangan pangan fungsional. Perkembangan dan pemasaran bahan pangan fungsional sangat menjanjikan. Bagi industri pangan, permintaan yang tinggi akan bahan pangan fungsional berarti sebuah peluang untuk meningkatkan keuntungan dengan melakukan inovasi pengembangan produk dan formulasi makanan sesuai dengan permintaan pasar. Beragamnya masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat juga berarti semakin luas segmen pasar dengan kebutuhan pangan fungsional tertentu. Beberapa hasil penelitian terbaru tentang produk pangan fungsional yang layak dikembangkan di antaranya susu formula bayi dan balita yang dilengkapi dengan prebiotik seperti FOS, GOS, dan inulin. Di samping itu, ada juga produk pangan fungsional lain seperti yoghurt sinbiotik dan tepung umbi-umbian kaya pati resisten. Bahan pangan fungsional berbasis tepung umbi-umbian kaya pati resisten dapat diolah menjadi produk olahan berupa kue kering, cake, cookies, mi, dan roti tawar.

Tepung umbi-umbian kaya pati resisten dapat digunakan sebagai substitusi tepung terigu karena memiliki *indeks glikemik* yang rendah sehingga dapat menurunkan glukosa darah dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Manfaat lain dari tepung umbi-umbian kaya pati resisten ialah peranannya sebagai sumber prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Aneka produk pangan fungsional tersebut dapat digunakan pihak industri untuk pengembangan pangan fungsional. Pemerintah juga diuntungkan pengembangan pangan fungsional. Setidaknya ada tiga komponen yang menjadi keuntungan bagi pemerintah, yaitu (a) kesempatan kerja dengan

berkembangnya industri makanan fungsional, (b) pengurangan biaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan (c) peningkatan pendapatan (pajak) dari industri pangan fungsional.

### 3.6. Akses Pasar

*Market access* atau akses pasar menggambarkan kemungkinan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar tertentu. Ketika akses pasar terbuka, ini berarti penjual dapat dengan mudah masuk ke pasar.

Akses petani kepada pasar juga turut dipengaruhi keberadaan *middlemen* seperti tengkulak. Namun, memangkas rantai pangan ini bukan perkara mudah, mengingat para *middlemen* memainkan peran sosio ekonomi yang penting bagi masyarakat pedesaan. Upaya meningkatkan akses pasar petani yang serius karenanya membutuhkan pendekatan struktural menyangkut kepemilikan lahan dan alat produksi, jalur logistik dan infrastruktur untuk menghubungkan desa, sentra pengolahan, dan pasar; serta pertimbangan terkait tatanan sosial pedesaan, termasuk organisasi petani.

Idealnya, seperti yang diidamkan para pendukung pasar bebas, barang dan jasa dapat secara bebas masuk dan keluar dari sebuah negara. Namun, faktanya, itu tidak terjadi. Banyak negara menerapkan sejumlah rintangan yang membatasi aliran barang dan jasa. Akses pasar mungkin tidak tersedia untuk beberapa alasan, baik yang dipaksakan secara alami atau secara institusional. Contoh hambatan alami termasuk lokasi geografis, jarak dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Sedangkan, contoh hambatan institusional adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Tarif impor dan kuota



adalah dua jenis hambatan akses pasar internasional yang sering dikutip.

### **3.7. Rendahnya Ekspor Hasil Pertanian**

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan melakukan ekspor hasil-hasil pertanian. Bagi para petani, untuk melakukan ekspor, tentu memiliki banyak persyaratan dan kualifikasi khusus. Terdapat dua jenis komoditas teridentifikasi berpotensi untuk diekspor. Jenis komoditas tersebut adalah komoditas perkebunan dan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

Apabila dilihat dari indikator perdagangan luar negeri, ekspor produk yang berasal dari sector pertanian juga semakin signifikan peranannya terhadap pola perdagangan internasional Indonesia. Dari Kementerian Pertanian pada tahun 2017 mencatat nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia mencapai angka US\$ 26.370 milyar, agak menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai US\$ 33,678 milyar atau turun rata-rata sebesar 7,83 persen per tahun. Penurunan kontribusi ekspor produk sector pertanian Indonesia terhadap total ekspor Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2012 yang memperlihatkan laju pertumbuhan sector pertanian memberikan kontribusi sebesar 0.51 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada periode tersebut tercatat sebesar 6,23 persen (BPS, 2013). Hal ini berarti peran sector pertanian dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Oleh karena itu perlu dipertahankan agar pertumbuhan sector pertanian dan peningkatan nilai tambahnya berbasis daya saing

harus terus dikembangkan secara optimal, agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada masa mendatang.

Seiring dengan terjadinya dinamika perubahan pada pasar internasional, sektor pertanian Indonesia dihadapkan dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat. Selain itu, terdapat beberapa tantangan pada sektor ini yang harus dihadapi antara lain:

- Meningkatkan daya saing pada komoditas pertanian berdasarkan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen
- Komoditas tersebut memiliki potensi dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor
- Merintis dan mengembangkan produk olahan pertanian baru.

Sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, fluktuasi pembangunan pertanian terutama yang dilihat dari kinerja ekspor produk pertanian terlihat sangat riskan. Fluktuasi ekspor produk sektor pertanian akan sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pengurangan jumlah penduduk miskin, kondisi taraf hidup masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita, termasuk perolehan devisa negara. Oleh karena itu daya saing sector pertanian harus terus dibangun dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Fluktuasi dan ketidakstabilan harga komoditas primer yang berasal dari ekspor non migas Indonesia telah terbukti memberikan dampak negative terhadap perekonomian Indonesia terutama dari sisi perolehan devisa. Hal ini pada gilirannya tentu akan sangat mempengaruhi pola dan dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kerjasama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) merupakan sebuah bentuk kerjasama antar negara berkembang dalam membangun solidaritas untuk saling membantu menyelesaikan permasalahan masing-masing. Selain itu Kerjasama Selatan-Selatan berfungsi untuk meningkatkan nilai tawar negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara-negara maju.

Sejalan dengan perannya yang semakin meningkat di dunia internasioanl, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang sesuai dengan arah pembangunan jangka Panjang tahun 2005-2025 yang salah satunya mewujudkan bangsa yang berdaya saing di tingkat global, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Sebagai negara yang sudah masuk dalam kelompok *lower middle income country*, Indonesia dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan memiliki peran sebagai negara yang memiliki tanggung jawab lebih dalam membantu negara-negara lain. Menyikapi tuntutan peran ke luar negeri yang semakin besar, maka Indonesia harus tetap bisa mengatur keseimbangan sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, salah satu solusi yang saling menguntungkan adalah dengan cara Indonesia mampu memberikan bantuan ke negara-negara lain untuk menjalin Kerjasama dan kedekatan sekaligus memperluas pasar ekspor. Berdasarkan hal tersebut maka upaya mencari potensi pasar ekspor baru bagi produk-produk pertanian Indonesia dan faktor-faktor pertanian Indonesia di negara-negara kurang berkembang menjadi penting untuk diperhatikan.

Terdapat empat komoditas yang mempunyai potensi pasar ekspor baru bagi produk-produk pertanian, yaitu komoditas teh, komoditas kelapa sawit, komoditas kelapa dan komoditas gula.

### **a. Komoditas Teh**

Teh merupakan komoditas pertanian penting karena Indonesia merupakan negara produsen teh pada urutan kelima di dunia setelah India, Cina, Sri Lanka dan Kenya. Menurut data *International Tea Commite (ITC)* pada tahun 2002, total produksi teh Indonesia mencapai 172.790 ton atau 5,7% dari total produksi teh dunia yang mencapai 3.062.632 ton. Sebesar 65% dari total komoditas teh Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor yang 94%-nya masih diekspor dalam bentuk daun kering.

Ekspor teh pernah mengalami penurunan rata-rata 2,1% per tahun dalam kurun waktu 1993-2002. Hal ini menurut Suprihartini (2005) disebabkan : (1) komposisi produk teh yang diekspor Indonesia kurang mengikuti kebutuhan pasar; (2) negara-negara tujuan ekspor teh Indonesia kurang ditujukan untuk negara-negara pengimpor teh yang memiliki pertumbuhan impor teh tinggi; (3) daya saing teh Indonesia di pasar teh dunia yang masih lemah. Oleh karena itu salah satunya diperlukan upaya meningkatkan komposisi produk teh melalui peningkatan ekspor teh Indonesia dalam bentuk produk-produk hilir teh.

Lebih lanjut Suprihartini (2005) menyebutkan bahwa kemampuan penguasaan teknologi pengolahan industri teh Indonesia masih berada pada tingkat kemampuan yang rendah khususnya kemampuan inovatif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi pengolahan di Industri teh Indonesia, program peningkatann kemampuan

inovatif perlu dijadikan suatu program aksi dari Asosiasi Teh Indonesia dan pemerintah.

## **b. Komoditas Kelapa Sawit**

Komoditas kelapa sawit (*palm oil*) merupakan komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Menurut data FAO (2012), Indonesia menduduki peringkat pertama luas tanaman kelapa sawit di dunia dengan luas sekitar 6,5 juta hektar dengan rata-rata kontribusi sekitar 35,69% dari total luas tanaman kelapa sawit di dunia. Komoditas ini memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, karena selain berperan sebagai penghasil devisa negara, juga berperan dalam penerapan tenaga kerja.

Menurut Hidayat (2006) menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi sangat besar terlihat dari luas dan produksi yang dihasilkan. Walaupun demikian pengembangan perkebunan kelapa sawit masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti luas kepemilikan, status hak tanah, produktivitas kebun, rendemen dan mutu produk, pabrik pengolahan pemasaran hasil dan konflik perusahaan dengan masyarakat.

Meskipun Indonesia termasuk peringkat pertama dalam produksi minyak kelapa sawit di dunia, namun dilihat dari produktivitasnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2008-2012 yang menyebutkan bahwa Indonesia hanya menempati urutan kedelapan dengan produktivitas rata-rata sekitar 16,87 ton/ha setelah Guatemala (26,23 ton/ha), Nicaragua (21,78 ton/ha), Malaysia (21,77 ton/ha), Colombia (20,69 ton/ha), Cameroon (19,03 ton/ha), Thailand (17,12 ton/ha), dan Costa Rica (17,01 ton/ha). Masih rendahnya

produktivitas kelapa sawit di Indonesia memberikan peluang untuk dapat memperluas perdagangan Indonesia di pasar internasional dengan cara lebih meningkatkan *research and development*. Meskipun secara angka komoditas kelapa sawit terlihat menjanjikan, namun menurut Hidayat (2006), melalui analisis keterkaitan dan efek penyebaran, sektor kelapa sawit memiliki peran yang kecil dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi. Namun melalui analisis pengganda sektor perkebunan menunjukkan besarnya peran perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja sehingga sektor ini dapat diprioritaskan dalam investasi pembangunan ekonomi walaupun mempunyai elastisitas yang rendah.

### **c. Komoditas Kelapa**

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting dalam perekonomian nasional terutama sebagai penghasil minyak nabati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di samping sebagai komoditas ekspor (Kementerian Pertanian 2014). Di Indonesia, perkebunan kelapa biasanya dikelola secara monokultur ataupun kebun campur. Perkembangan luas areal kelapa di Indonesia selama tahun 1980-2013 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 1980, luas areal kelapa di Indonesia sebesar 2.680.423 ha, dan di tahun 2013 meningkat menjadi 3.653.574 ha.

Meskipun Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di dunia, namun produk olahan masih terbatas baik jumlah maupun jenisnya. Menurut Tambajong (2010), hal ini disebabkan karena terjadinya keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan struktur industri masih bersifat parsial dan

individual sehingga optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan seluruh potensi kelapa masih rendah. Menurut Sianipar (2009) hal ini terjadi karena petani kelapa pada umumnya menjual produknya dalam bentuk produk primer (kelapa segar dan kopra).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut TAmbojong (2010) menyebutkan bahwa factor penggerak kunci keberhasilan adalah melalui penyediaan infrastruktur agribisnis Kawasan menunjang subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran hasil, dan subsistem jasa penunjang. Oleh karena itu diperlukan Kerjasama antar sektor penggeraknya, seperti pemerintah sebagai *leader*, organisasi masyarakat sebagai *partner* pemerintah, akademisi sebagai pendamping, perbankan sebagai penunjang permodalan petani, dan swasta sebagai partner petani.

#### **d. Komoditas Gula**

Tebu merupakan komoditas yang penting di Indonesia sebagai bahan baku utama gula dan pemanis makanan atau sumber pembuatan bahan bakar terbarukan (Bio-ethanol). Menurut Bantacut (2013) menyebutkan bahwa swasembada gula tidak mungkin dicapai melalui pertumbuhan produksi normal, melainkan harus membangun pabrik-pabrik gula yang baru. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengoptimalkan ketersediaan lahan yang terpecah untuk mendukung pabrik gula mini.

Mulyono (2011) menambahkan bahwa Indonesia harus mengembangkan industri bibit tebu unggul untuk menunjang program swasembada gula nasional. Banyak permasalahan di sekitar industri gula di Indonesia, seperti misalnya masalah

efisiensi di tingkat usahatani dan pabrik, dan kebijakan yang kurang memadai di tingkat domestik dan perdagangan internasional (Susila, 2005). Oleh karena itu untuk mewujudkan Kembali industri gula yang efisien memerlukan rancangan kebijakan yang menyeluruh, mempunyai keterkaitan dan keselarasan yang jelas antara satu kebijakan dengan yang lain, dan terintegrasi sehingga cukup efektif untuk mencapai tujuan yang sama.



## BAB IV

# ARAH KEBIJAKAN

**D**alam menghadapi tantangan persaingan pasar global, tidak semua komoditas didorong untuk memiliki daya saing dengan negara lain. Jika komoditas diminati oleh pasar dalam negeri maka peningkatan produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya jika komoditas yang belum berdaya saing dan kurang diminati konsumen dalam negeri perlu dilakukan peningkatan daya saing untuk ekspor. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk peretanian melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor.

Pertanian di Indonesia dikuasai oleh petani kecil dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi. Keterbatasan yang dimiliki petani, antara lain dalam bentuk permodalan, penguasaan lahan, keterampilan, pengetahuan, aksesibilitas akan informasi pasar dan teknologi pertanian, serta posisi tawar akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam penentuan komoditas yang akan diusahakan dan teknologi yang akan diterapkan petani. Rendahnya tingkat modernitas atau kemampuan petani untuk membuka diri

terhadap suatu pembaharuan dan atau informasi yang berkaitan dengan unsur pembaharuan juga semakin memperburuk kondisi petani dalam membuat keputusan untuk menolak atau menerima inovasi. Hal ini akan bermuara pada rendahnya pendapatan dan keadaan yang sulit berkembang.

#### **4.1. Inovasi Teknologi**

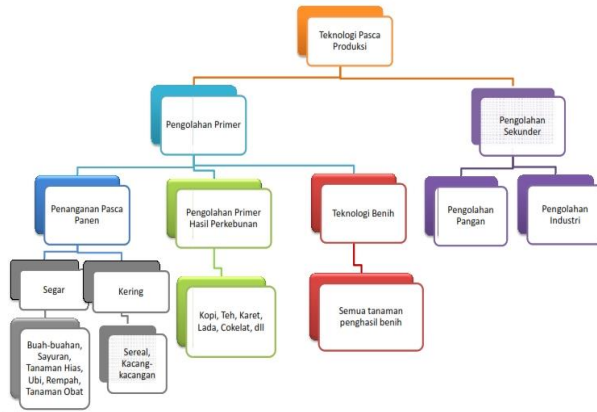
Upaya peningkatan produktifitas lada memerlukan inovasi teknis dan inovasi kebijakan. Beberapa diantaranya adalah: (i) membangun sistem industri penangkaran/pembibitan lada di daerah sentra produksi dan wilayah pengembangan baru; (ii) menerapkan kebijakan pewilayahan komoditas; (iii) mendorong pertumbuhan agroindustri diversifikasi produk, dan (iv) mempercepat penerapan an penguasaan teknologi terkait industri lada.

Dengan demikian, dalam bidang pengembangan pertanian, akses terhadap inovasi pertanian menjadi hal yang sangat penting demi kelangsungan usaha tani yang dilaksanakan. Inovasi pertanian yang memadai dan tepat waktu didukung informasi pertanian terkait lainnya dapat digunakan sebagai dasar strategi penguasaan pasar dan dasar perencanaan untuk pengembangan usaha tani lebih lanjut (Mulyandari 2005).

## 4.2. Penanganan Pasca Panen

Dalam bidang pertanian istilah pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut Pasca produksi (*Postproduction*) yang dapat dibagi dalam dua bagian atau tahapan, yaitu pasca panen (*postharvest*) dan pengolahan (*processing*). Penanganan pasca panen (*postharvest*) sering disebut juga sebagai pengolahan primer (*primary processing*) merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan atau penampakan, kedalamnya termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Pengolahan (*secondary processing*) merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama (pengawetan), mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain, termasuk pengolahan pangan dan pengolahan industri

Tujuan utama dari penanganan pascapanen adalah mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing dan mencegah kerusakan fisik. Penyimpanan pada pascapanen berperan sangat penting dalam upaya mempertahankan kualitas hasil pertanian.



**Gambar 4. Hubungan Berbagai Bidang Kajian Dalam Pasca Produksi Hasil Pertanian**

Sumber : Bautista (1990) – diterjemahkan

Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan dasar pengembangan agroindustri yang berdaya saing. Hasil litbang pascapanen dimaksudkan untuk meningkatkan inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor.

Pemerintah telah menetapkan dan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan pasca panen, baik untuk tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan arahan bagi petani dan pelaku bisnis pangan untuk dapat membantu meningkatkan *value added* bagi produk yang dihasilkan.

### **4.3. Peningkatan Akses Petani**

Adalah kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pertanian skala kecil. Untuk itu diperlukan adanya akselerasi pengembangan infrastruktur pedesaan dan pertanian, peningkatan akses petani terhadap lembaga perkreditan, peningkatan penguasaan teknologi prapanen – pascapanen di tingkat petani, dan pengembangan agroindustri berbasis pertanian di pedesaan.

#### **4.3.1 Teknologi**

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani (UU No. 19 Tahun 2013). Dalam Pasal 3d dan 3e disebutkan bahwa pemerintah melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan

Keberhasilan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh rumah tangga petani dan nelayan sudah terbukti dilakukan di beberapa negara berkembang. Dalam hal ini, Sumarjo dan Mulyandari (2006) menegaskan bahwa mulai akhir abad 20 akses informasi pasar di negara Cina sudah dilakukan melalui PCs desktop. Pada saat

ini, selain pengusaha besar, petani sudah mulai akses informasi pasar melalui TIK seperti telepon seluler (*mobile phones*) dengan biaya yang relatif lebih murah. Selanjutnya mereka menguraikan tentang *lesson learned* pemanfaatan TIK dalam mendukung sistem usaha pertanian di beberapa negara berkembang.

Dukungan berupa insentif fiskal untuk sektor teknologi pertanian sudah diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/2020. Namun aturan tersebut mensyaratkan komponen penelitian dan pengembangan teknologi baru. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 10/2021 juga sudah memberikan insentif berupa *investment allowance* untuk industri mesin pertanian dan kehutanan, namun membatasi cakupan produknya pada perakitan traktor dan pembuatan mesin penggilingan padi. Selain menerapkan UU Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor/impor, pemerintah juga perlu terus mendorong digitalisasi UMKM, dan memaksimalkan distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen melalui pengembangan sistem logistik pangan yang efisien, dan penguatan kerja sama antar-daerah khususnya dalam pemenuhan pangan.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat menunjang pemasaran. Selain ketersediaan produk (suplai) juga dapat memberi informasi potensi permintaan. Promosi produk pada taraf tertentu juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

### 4.3.2. Sarana dan Produksi

Sesungguhnya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pertanian skala kecil tidak hanya didasari pertimbangan logis dari ketidakberdayaan petani kecil menghadapi era pasar global. Adalah fakta bahwa pertanian Indonesia didominasi pertanian skala kecil, sedangkan peran sektor pertanian sangat strategis karena berkaitan erat dengan aspek-aspek sentral dalam pembangunan nasional yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemberdayaan pertanian di Indonesia sangat membutuhkan adanya pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang kondusif untuk memperlancar arus distribusi, komunikasi, penyebaran informasi dan akses pasar. Berbagai studi memperoleh kesimpulan bahwa selama ini sumber utama kelemahan pertanian skala kecil berasal dari tingginya biaya transaksi. Penyebabnya terkait dengan sangat terbatasnya infrastruktur pertanian dan pedesaan, kurang lancarnya arus komunikasi dan penyebaran informasi, dan distribusi spasial unit-unit sentra produksi pertanian yang terserak dan tak terkonsolidasi serta tidak *match* dengan sentra-sentra pemasaran.

Perlindungan dan pemberdayaan pemerintah bukan terbatas pada kemampuan petani menghasilkan produk pertanian. Pemerintah juga berupaya agar petani dapat memperoleh sarana produksi secara mudah, teknologi yang memadai, dan pemasaran hasil yang menguntungkan sehingga petani tetap bergairah untuk menghasilkan produk pertanian, khususnya pangan.

### 4.3.3. Kredit

Selain infrastruktur, kebijakan dan program yang kondusif untuk meningkatkan akses petani terhadap lembaga perbankan sangat diperlukan. Selama ini rendahnya kapasitas petani di Indonesia untuk melakukan inovasi maupun mengadopsi teknologi yang lebih maju disebabkan oleh keterbatasannya dalam permodalan. Stigmatasi kalangan perbankan komersial terhadap pertanian skala kecil sebagai unit usaha penuh risiko dan kurang layak sebagai nasabah penerima kredit harus diubah dan pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan dan program yang dapat mengubah kondisi tersebut.

Pertanian sudah terbukti merupakan salah satu sektor yang masih mampu memperlihatkan laju pertumbuhan positif di saat pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen *year-on-year (YoY)* pada triwulan pertama tahun 2021 ini. Insentif berupa dukungan permodalan seperti subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pertanian serta stimulus ekonomi lainnya dari pemerintah.

Namun masih diperlukan juga bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Insentif pajak untuk mendorong investasi sektor swasta pada teknologi pertanian juga perlu didukung untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian.

Data BKPM memperlihatkan, realisasi penanaman modal asing (PMA) di sektor pertanian hanya 3-7 persen dari total realisasi PMA antara 2015 dan 2019. Padahal investasi sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan kapasitas petani, dalam bercocok tanam maupun penguasaan teknologi,



yang akan sangat berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Implementasi UU Cipta Kerja yang memberikan relaksasi jumlah batas investasi asing pada sektor pertanian juga diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi pada sektor pertanian.

Subsidi bunga kredit pertanian di perbankan, terutama tanaman pangan dan hortikultura juga kurang pro-petani. Dari total kredit ke sektor pertanian, lebih dari 60% untuk perkebunan sawit. Padahal, perkebunan sawit biasanya pemilik modal besar. Kendala petani dalam mengakses kredit perbankan adalah persyaratan formal yang dibutuhkan perbankan sulit dipenuhi oleh para petani. Hal ini dilematis karena Bank dalam pemberian kredit selalu terikat pada aturan hukum yang berlaku. Pemerintah mengupayakan pengembangan kredit pada sektor pertanian, disisi lain Bank melalui peraturan Bank Indonesia menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyalurannya dengan pembebanan resiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus.

#### **4.3.4. Pasar**

Membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian, terutama untuk produk segar seperti sayuran dan buah-buahan, merupakan kebijakan yang perlu diprioritaskan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Agar hasil pertanian dapat diserap secara optimal, diperlukan peningkatan infrastruktur subsektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan serta perdagangan ritel, mendorong kemitraan dengan penjamin (*offtaker*), serta meningkatkan daya beli konsumen.

Upaya meningkatkan akses pasar petani yang serius karenanya membutuhkan pendekatan struktural menyangkut kepemilikan lahan dan alat produksi, jalur logistik dan infrastruktur untuk menghubungkan desa, sentra pengolahan, dan pasar; serta pertimbangan terkait tatanan sosial pedesaan, termasuk organisasi petani.

Akses petani kepada pasar juga turut dipengaruhi keberadaan *middlemen* seperti tengkulak. Memangkas rantai pangan ini bukan perkara mudah, mengingat para *middlemen* memainkan peran sosioekonomi yang penting bagi masyarakat pedesaan.

Upaya meningkatkan akses pasar petani yang serius karenanya membutuhkan pendekatan struktural menyangkut kepemilikan lahan dan alat produksi, jalur logistik dan infrastruktur untuk menghubungkan desa, sentra pengolahan, dan pasar; serta pertimbangan terkait tatanan sosial pedesaan, termasuk organisasi petani.

#### **4.4. Pengembangan Korporasi Pertanian**

Korporasi petani merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti oleh petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5ha, hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien sehingga petani cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Melalui korporasi petani, asas *economic of scale* dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir; subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budidaya pertanian sebagai simpul inti.

Karena itu, pengembangan korporasi petani sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan pertanian. Namun, pengembangan korporasi petani belum berjalan mulus, meskipun telah tertuang dalam RPJM 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dengan program “Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan”.

Transformasi pertanian dari semula berdasarkan asas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani. Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: (1) Transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; (2) Transformasi pengembangan kelembagaan petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, dan modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, serta potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan (3) Transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Keterpaduan formasi strategi makro-mikro yang diperlukan dalam pengembangan korporasi petani. Pertama dengan membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani. Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan *stakeholders* terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani.

Kedua yakni penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif melalui; (a) Peningkatan kapasitas SDM petani; (b) Pengembangan investasi sosial; (c) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung; (d) Peningkatan jejaring kerjasama bisnis; dan (e) Penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini diupayakan menjadi basis utama dalam pengembangan korporasi petani.

Ketiga dengan pendampingan kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. Hal ini sangat penting karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Keempat, pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi

petani, yang sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani.

Kelima, penyempurnakan berbagai dokumen terkait dengan pengembangan korporasi petani khususnya *Grand Design*, Pedoman Umum, dan Petunjuk Pelaksanaan pengembangan korporasi petani supaya menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat.

#### **4.5. Kewirausahaan Petani**

Berbagai bentuk upaya peningkatan pendapatan rumah tangga petani di wilayah pedesaan merupakan salah satu tujuan pokok dalam dinamika pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini menjadi suatu yang penting diperhatikan mengingat tekanan ancaman kemiskinan pada masyarakat petani di pedesaan masih relatif tinggi.

Persoalan kemiskinan pada petani bukan hanya dikarenakan tekanan dominan dari faktor ekonomi sehubungan dengan keterbatasan modal produksi. Akan tetapi faktor lain yang justru lebih berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia petani yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dalam hasil penelitian Dumasari, et al (2007) didukung Dumasari dan Wantemin (2010) yang menunjukkan bahwa selain tingkat pendidikan yang relatif rendah (rata-rata sekolah dasar) ternyata tingkat partisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan tak formal juga minim. Tingkat produktivitas, kreativitas kerja, posisi tawar dan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki petani dalam mengelola bisnis kreatif juga tergolong rendah.

Semangat dan kemampuan petani yang relatif lemah dalam kewirausahaan menjadi salah satu faktor sosial ekonomi yang menghambat pengembangan potensi diri dalam mengelola bisnis mikro produktif di pedesaan.

Kewirausahaan termasuk salah satu kebutuhan strategis bagi petani dalam mengelola usaha bisnis mikro berbasis sumber daya lokal di pedesaan. Intervensi efek global yang memasuki ranah kawasan kehidupan masyarakat petani di pedesaan menuntut optimalisasi fungsi kewirausahaan yang diharapkan mampu mengarahkan perilaku berorientasi pada *better farming, better business dan better living*.

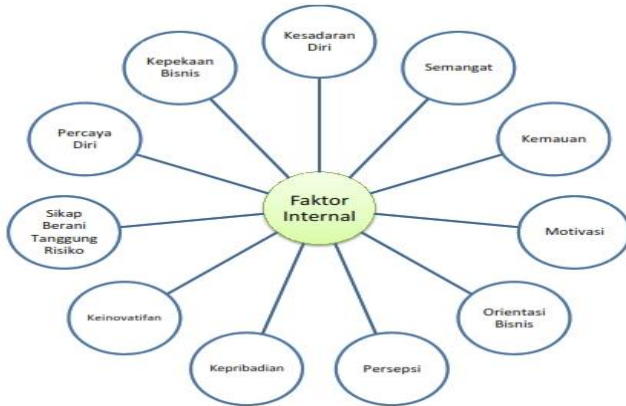
Berdasarkan hasil penelitian Dumasari (2014) kewirausahaan petani merupakan salah satu kebutuhan strategis dalam pengelolaan berbagai jenis bisnis mikro di pedesaan. Beberapa faktor penentu memberi pengaruh terhadap pengembangan kewirausahaan petani. Pada kondisi dan waktu tertentu menjadi faktor pendukung sementara pada kondisi dan waktu yang lain justru menjadi faktor penghambat. Kewirausahaan petani ternyata mempunyai beberapa fungsi strategis bagi pengelolaan bisnis mikro di pedesaan.

Upaya pemberdayaan petani melalui pengelolaan beragam jenis bisnis mikro membutuhkan pengembangan kewirausahaan yang berbasis sumber daya lokal. Pengembangan kewirausahaan tersebut potensial dilakukan melalui kegiatan pendidikan tak formal dengan mengandalkan pendekatan kelompok secara partisipatif.

Meredith (2005) menjelaskan bahwa beberapa faktor penentu berharga dalam mempertahankan jiwa sekaligus kemampuan kewirausahaan adalah sikap positif, tekad,

---

pengalaman, ketekunan dan kerja keras. Beberapa faktor yang dikemukakan Meredith tersebut cenderung bersifat internal. Fungsinya ialah menjadi prasyarat bagi seseorang yang mengembangkan kewirausahaan. Adapaun faktor internal dapat dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 5. Ragam Faktor Internal Penentu Kewirausahaan Petani**

(Sumber : Meredith, 2005 – dalam Dumasari, 2014)

Disamping ragam faktor internal penentu, terdapat juga beberapa faktor eksternal yang sangat berpotensi sebagai pendukung dan penghambat. Pada Gambar 6 terlihat beberapa faktor eksternal.



**Gambar 6. Ragam Faktor Eksternal Penentu Kewirausahaan Petani**

(Sumber : Meredith, 2005 – dalam Dumasari, 2014)

Daya keberpengaruhan setiap faktor eksternal penentu tergantung pada jalinan interaksi, hubungan sosial, komunikasi antara petani dengan berbagai pihak terkait. Beberapa keadaan lain yang berpotensi mewarnai kekuatan pengaruh faktor eksternal penentu ialah ketersediaan fasilitas pelayanan informasi teknologi inovatif, modal produksi, harga, dan pasar yang tersedia di lingkungan desa. Optimalisasi pengaruh faktor eksternal penentu yang mendukung pengembangan kewirausahaan petani dalam pengelolaan bisnis mikro yang produktif dan kreatif lebih mudah terlaksana melalui penguatan kerjasama dan kemitraan berpola mutualisme dengan pendekatan kelompok.



## 4.6. Pengembangan Pangan Fungsional

Dari sisi pangan dan produk olahan diperlukan program pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pangan pokok melalui inventarisasi dan identifikasi pangan lokal di daerah. Industrialisasi pengolahan pangan merupakan cara yang tepat dalam upaya pengembangan pangan lokal, agar produk pangan lokal menjadi lebih dikenal dan lebih meluas. Hal ini perlu didukung oleh upaya dan strategi pengelolaan yang baik agar mampu mengurangi serbuan pangan lokal impor yang menerapkan strategi *franchise* dan di beberapa lokasi telah meminggirkan pangan olahan lokal.

Pengembangan bahan lokal menjadi pangan fungsional, perlu memperhatikan kandungan komponen bioaktif pada bahan pangan yang didukung oleh pengembangan inovasi pangan lokal, untuk mendapatkan pangan fungsional yang dapat mempengaruhi efek fisiologis terhadap kesehatan tubuh bagi yang mengkonsumsinya

Ketahanan pangan perlu didukung oleh inovasi teknologi pangan sebagai upaya optimalisasi bahan pangan lokal. Potensi bahan pangan lokal yang dapat dijadikan pangan fungsional, di antaranya buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat pangan yang diperlukan untuk menjaga sistem imunitas tubuh, tercatat 400 jenis tanaman buah-buahan asli Indonesia dan introduksi. Proses suplementasi, fortifikasi, dan *enrichment* dapat dilakukan pada pengembangan inovasi pangan lokal. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna – LIPI telah melakukan penelitian dengan memanfaatkan potensi bahan pangan lokal meliputi : (1) jagung bose instan difortifikasi oleh zat besi (Fe) dan suplementasi kacang merah sebagai sumber

protein; (2) produk dari mocaf yang difortifikasi vitamin dan mineral menjadi mie kering, pasta, bubur instan, puding instan, biskuit, dan snack; (3). produk olahan dari pisang di antaranya *banana flake* dan *banana bar* yang dapat dikonsumsi oleh balita; (4) produk dari ikan sebagai sumber protein yang diperkaya daun kelor menjadi *nugget* dan bakso; (5) pemanfaatan daun kelor untuk produk *crackers*, minuman instan, dan *rowe* kelor; (6) pengembangan produk dari sorghum yang diperkaya sumber protein dari tepung kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai menjadi bubur instan, (7) minuman lidah buaya (Aloegin) sebagai *immunostimulan*, dan (8) produk minuman berbasis ciplukan untuk pencegahan terhadap diabetes mellitus.

Hilirisasi hasil pengembangan inovasi pangan lokal dilakukan melalui tahapan: (1) pengembangan pada skala laboratorium, (2) pengembangan pada skala ganda (*scaling up*) yang merupakan tahap persiapan sebelum teknologi diterapkan, pada tahap ini diperlukan dukungan peralatan teknologi yang tepat guna pada skala pilot plant, dan (3) alih teknologi (*transfer of technology*) terhadap *stakeholder* pengguna teknologi (*user of technology*).

Adanya masalah keragu-raguan konsumen terhadap keamanan makanan dan minuman tertentu yang masih beredar di pasaran saat ini dan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif serta besarnya biaya perawatan sakit merupakan faktor yang sangat mendukung dikembangkannya pangan fungsional. Sifat fungsional dari pangan fungsional ditentukan oleh komponen bioaktif yang ada di dalamnya. Indonesia kaya akan sumber bahan pangan dengan kandungan komponen bioaktif yang potensial untuk dikembangkan. Teknologi pangan dan penelitian-penelitian yang terkait dengan pangan fungsional

sudah dikembangkan. Hal ini semua menjadi modal dasar untuk mengembangkan pangan fungsional. Pangan fungsional yang akan berkembang pesat di masa mendatang adalah yang erat kaitannya dengan pangan yang mampu menghambat proses penuaan, meningkatkan daya immunitas tubuh, meningkatkan kebugaran, kecantikan wajah dan penampilan, mendukung relaksasi tidur dan istirahat, serta “*good for mood*”. Dengan demikian industri pengolahan pangan fungsional di Indonesia sangatlah prospektif. Pengembangan industri pangan fungsional tidak hanya menguntungkan bagi industri, tetapi juga masyarakat dan pemerintah (Suter, 2013).

#### **4.7. Perbaikan Sistem Pemasaran**

Kinerja pemasaran produk pertanian yang baik, khususnya pangan, akan mendorong petani menghasilkan pangan melebihi kebutuhan rumah tangga. Petani akan memasarkan sebagian produksinya setelah dikurangi untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (marketed surplus atau marketable surplus). Hasil panen yang dijual digunakan oleh petani untuk membayar tenaga kerja, sarana produksi, sewa lahan maupun kebutuhan sehari-hari (Raquibuzzaman, 1966). Pemasaran juga memberi insentif kepada petani agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen serta mengikuti standar pemasaran yang berlaku. Bahkan petani bersedia memproduksi pangan yang bukan merupakan pangan pokok karena produknya laku dijual dan menguntungkan.

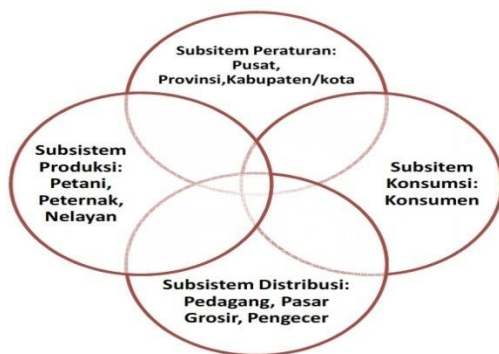
Kinerja pemasaran diukur dari keuntungan yang diperoleh produsen (petani) atau persentase harga yang diterima petani dibanding harga eceran, efisiensi rantai pemasaran, dan keterjangkauan harga produk oleh konsumen (Carlon dan

Perloff, 2000). Intervensi pemerintah dapat mempengaruhi kinerja pasar. Untuk komoditas pangan yang bersifat strategis, intervensi pemerintah umumnya dapat membuat kinerja pasar menjadi lebih baik.

Crawford (1997) memberi definisi bahwa pemasaran bukan sekedar perpanjangan proses produksi. Konsumsi merupakan tujuan akhir dari produksi sehingga produsen berminat mempromosikan produknya agar diminati konsumen. Pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian jasa untuk memindahkan produk atau komoditas dari tempat produksi ke tempat konsumsi. Dalam hal ini setiap agen termasuk lembaga pemerintah mengenali tugas masing-masing dalam pemasaran komoditas. Di negara-negara berkembang hal ini lebih dikenal dalam pemasaran bahan pangan pokok dimana ditunjukkan lembaga khusus yang memasarkan komoditas tertentu, misalnya beras, bekerjasama dengan berbagai agen pemasaran. Definisi ini bisa menghilangkan konsep pemasaran, yaitu berorientasi konsumen dan kesinambungan yang terpadu. Definisi lain pemasaran adalah orientasi manajemen yang fokus pada seluruh kegiatan lembaga atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang dari lembaga pemasaran tersebut. Definisi ini berorientasi konsumen dan keberadaan produsen atau lembaga pemasaran. Selain itu, konsep pemasaran ini tidak menghilangkan peranan lembaga pemasaran nirlaba, seperti proyek pembangunan, lembaga yang memberi bantuan, lembaga penyuluhan. Konsep pemasaran ini juga berlaku untuk lembaga komersial karena memadukan produksi dengan kebutuhan serta kepuasan konsumen. Jika konsep ini hanya diadopsi maka akan dapat menimbulkan masalah. Misalnya, perusahaan pemasaran yang sangat

berorientasi konsumen dan ingin memuaskan kebutuhan konsumen dengan produk yang dipasarkan. Di lain pihak, sektor produksi tidak sebagai pemasok bahan baku tidak mendapat perhatian yang memadai. Volume produksi dan suplai secara teratur sesuai permintaan konsumen mungkin tidak terpenuhi. Dapat juga terjadi bagian produksi yang memadai dan permintaan konsumen yang sudah pasti tetapi tidak bisa terpenuhi karena moda pengangkutan yang tidak sesuai dengan karakter produk.

Ada empat subsistem pemasaran pangan dan produk pertanian, yaitu produksi, distribusi, konsumsi dan peraturan (Gambar 7). Pelaku utama dalam rantai kegiatan yang menghubungkan pangan dan pertanian adalah petani (atau nelayan, peternak), perantara, pengolah pangan dan konsumen. Prakteknya mereka memandang pemasaran pangan/produk pertanian sesuai kepentingan masing-masing. Pada taraf tertentu kepentingan mereka saling bertentangan).



**Gambar 7. Subsistem pada Sistem Pemasaran Pangan dan Produk Pertanian (Crawford, 1997)**

Ketersediaan infrastruktur yang menunjang pemasaran, seperti jalan raya, pasar, dan fasilitas penyimpanan, akan mempermudah petani menjual hasil panennya dengan harga yang layak (Crawford, 1997). Selain infrastruktur pemasaran, kualitas pasar juga didukung oleh hukum, peraturan, perjanjian serta faktor-faktor dasar seperti budaya, moral, dan etika (Furukawa dan Yano, 2014). Produksi hasil panen petani secara umum harus memenuhi standar atau selera konsumen. Pengolahan pasca panen diperlukan agar produk tetap segar atau dalam kondisi memadai dalam distribusi hingga sampai konsumen. Fasilitas jalan raya untuk transportasi, sarana pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, dan tempat eceran (*outlet*) harus terpenuhi.

#### **4.8. Ekspor Produk Pertanian**

Indonesia memiliki beberapa komoditas ekspor. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian adalah kelapa sawit yang selama ini jadi andalan. Selain minyak sawit, jenis komoditas ekspor perkebunan Indonesia adalah kopi, karet, rempah-rempah, teh, kakao, dan kopra. Komoditas pertanian meliputi hasil perkebunan, tanaman pangan, perikanan budidaya dan tangkap, peternakan, tanaman hortikultura kelompok sayuran dan buah-buahan, dan komoditas kehutanan.

Di luar pertanian, Indonesia juga memiliki beberapa komoditas utama dari barang industri. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dihasilkan dari usaha industri adalah produk tekstil, otomotif, elektronik, alas kaki, dan makanan olahan. Dalam perdagangan ekspor impor, secara umum komoditas terbagi menjadi empat jenis yakni:

- ❖ Komoditas logam berupa produk-produk hasil mineral tambang seperti emas, perak, platinum, nikel, tembaga, seng, dan sebagainya.
- ❖ Komoditas pertanian adalah komoditas yang berasal dari hasil pertanian maupun perkebunan seperti beras, gandum, karet, sawit, kapas, kedelai, jagung, kopi, dan sebagainya.
- ❖ Komoditas peternakan meliputi semua komoditas yang mencakup ternak hidup dan produk turunannya seperti daging, susu, keju, dan sebagainya.
- ❖ Komoditas energi merupakan komoditas yang berfungsi sebagai sumber energi seperti minyak bumi, gas, listrik, dan sebagainya.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan melakukan ekspor hasil-hasil pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih mampu memperlihatkan laju pertumbuhan positif di saat pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen *year-on-year* (YoY) dalam triwulan pertama tahun 2021 ini. Ekspor sektor pertanian juga memperlihatkan pertumbuhan 16,2 persen (YoY) dan 20,8 persen *month-to-month* (MtM) dengan nilai ekspor sebesar USD 0,4 persen, atau tiga persen dari total ekspor Indonesia.

Komoditas ekspor non-migas yang menjadi unggulan negara Indonesia dan menempati peringkat dunia hingga saat ini terdapat beberapa, diantaranya adalah teh, kopi, kelapa sawit, kelapa, gula,

**Tabel 2. Komoditas Pertanian yang Berpotensi Diekspor**

No	Jenis Komoditas	Rincian Komoditas yang Berpotensi Diekspor
1	Komoditas Perkebunan	Sayuran: kubis, sawi, bunga kol
		Buah : kelapa, manggis, pisang
		Tembakau
		Kopi
		Rempah-rempah : kayu manis, cengkeh
		Karet
		Kelapa sawit
2	Komoditas Perikanan Tangkap & Perikanan Budidaya	Ikan Segar/dingin hasil tangkap

(Sumber; Artikel Pak Tani : <http://paktanidigital.com>)

#### 4.8.1. Promosi

Kerjasama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) merupakan sebuah peluang yang baik bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor produk-produk pertanian yang menjadi unggulan komparatifnya. Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia, permintaan produk-produk Indonesia semakin bertambah. Sehingga diperlukan sikap bersama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan produk-produk yang berkualitas dan memiliki harga yang kompetitif di pasar dunia.



Sejalan dengan perannya yang semakin meningkat di dunia Internasional, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang 2005 – 2025, yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing di tingkat global, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

#### **4.8.2. Fasilitas**

Melalui berbagai fasilitas yang diberikan, Bea Cukai kembali berperan aktif dalam mendorong ekspor serentak produk pertanian di berbagai daerah. Melalui kemudahan fiskal dan kemudahan pelayanan, Bea Cukai berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor, sehingga dapat membantu pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Peraturan pemerintah terkait fasilitas ekspor bagi pertanian sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pemberian fasilitas dari pemerintah kepada para petani juga terlihat dari Kementerian Pertanian (Kementan) memfasilitasi ekspor tanaman hias ke enam negara dengan total nilai mencapai Rp 2,1 triliun pada tahun 2021. Peluang ekspor tanaman hias dari Indonesia kian terbuka seiring luasnya keanekaragaman hayati yang dimiliki. Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong para pelaku usaha sektor pertanian, khususnya florikultura dalam menjamah pasar ekspor. Permintaan tanaman hias yang tinggi ke Indonesia mencerminkan adanya kebutuhan dunia yang besar untuk produk florikultura. Pemerintah menghargai upaya para petani-

petani tanaman hias yang selama ini terus membudidayakan aneka tanaman sehingga bisa dikenal pasar global. Hal itu menjadi salah satu alternatif bidang usaha di tengah tantangan pandemi Covid-19. Pemerintah pun mendorong penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan usahanya di bidang tanaman hias.

#### 4.9. Upaya Pemerintah

Strategi peningkatan daya saing pada sektor pertanian setidaknya beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, antara lain<sup>5</sup>:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Di Indonesia, masih banyak petani yang berpotensi terkena dampak perdagangan bebas. Ketersediaan informasi dari data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk petani merupakan hal yang perlu dilakukan
- Memperbaiki kebijakan hukum yang berlaku. Sinkronisasi pada kebijakan ini perlu dilakukan agar setiap kementerian berjalan dengan tujuan yang sama walaupun memiliki langkah yang berbeda
- Mengembangkan sektor komplemen pertanian (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar)
- Mempelajari kebijakan-kebijakan dari negara lain. Hal ini perlu dilakukan karena daya saing tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dihasilkan oleh *resultane* dari kebijaksanaan di dalam negeri dan kebijaksanaan dari negara-negara lain.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui kebijakan dan program:

### **1. Intervensi Pasar**

- Menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian dalam negeri untuk menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian.
- Menjamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian dalam negeri (antar daerah di seluruh Indonesia).
- Mempromosikan komoditas Indonesia ke negara asing.
- Memberi bea masuk tinggi untuk impor barang yg sama dari luar negeri melindungi komoditas yg diproduksi dalam negeri

### **2. Standardisasi Kualitas Sektor Pertanian**

- Revitalisasi Bulog, kampus dan industri sektor pertanian dalam penetapan standar dan pelatihan kepada produsen agar produknya dapat memenuhi standar tersebut
- Insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pertanian Indonesia.
- Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluh pertanian yang efektif untuk petani (petani disini termasuk peternak, nelayan, perkebun) melibatkan kampus dan swasta yang terlibat dlm industri ini.

### **3. Subsidi Input Pertanian Dan Lanjutan**

- Memberikan subsidi pupuk, alat pertanian, kapal, bibit, obat hewan peliharaan dan memberikan pengawasan terhadap mekanisme pemberian subsidi-subsidi tersebut.

- Insentif untuk swasta atau industri-industri yang mau terlibat misalnya industri input (pupuk, benih) sehingga tercipta harga pupuk yang lebih masuk akal.
- Insentif untuk industri lanjutan (industri pengolahan makanan) untuk menjaga keutuhan mata rantai industri pertanian

#### **4. Peningkatan Produktivitas Daerah Produsen**

- Menjamin ketersediaan sekolah, puskesmas, listrik, pasar di daerah-daerah (pantai, perkebunan, pedesaan) sehingga usia produktif tertarik membangun desanya.
- Diversifikasi pangan lokal seperti: gatot, thiwul, emping, lempur, geplak, dan lain-lain pangan lokal berbagai daerah di Indonesia. Bahan makanan tersebut juga memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan beras. Cara ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan dan sekaligus menghasilkan pangan lokal yang berdaya saing.

#### **5. Infrastruktur**

- Menjamin irigasi, jalan dan jembatan serta angkutan gratis/murah untuk distribusi produksi pertanian
- Mengembangkan fasilitas pembuangan limbah ternak supaya dapat berdaya guna seperti pupuk kompos dll.

#### **6. Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian/ Kebun**

- Insentif berupa keringanan pajak untuk setiap hektar tanah/jumlah peliharaan yang dimiliki.

## 7. Penunjukkan/Pembentukan Lembaga Keuangan (Bank Atau Asuransi) Yang Pro-Petani

- Pemberian kredit murah (subsidi bunga) untuk petani khususnya petani kecil.

## 8. Perlindungan Terhadap Gagal Panen/Masa Paceklik Untuk Petani

- Kerja sama dengan lembaga lain seperti BNPB, BMKG dll untuk memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam dan anomali iklim.

### 4.10. Strategi Peningkatan Daya Saing Pangan

Indonesia sebenarnya tidak hanya mampu mencapai swasembada pangan, tetapi juga mampu melakukan kemandirian panga, berkedaulatan dalam pangan, bahkan mampu memberikan kontribusi pada ketahanan pangan dunia. Beberapa komoditas pangan strtaegis, seperti beras, jagung dan daging sapi sudah mengalami surplus walaupun beberapa komoditi pangan lain seperti kedelai, gandum, susu dan buah-buahan masih defisit.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan daya saing pangan adalah pertama nilai tukar petani dan nelayan yang relative rendah sehingga kedua sektor ini mendai tidak menarik, terutama untuk generasi muda; kedua skala usaha yang terlalu kecil, sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, hal ini menyebabkan usahatani di Indonesia terutama Pulau Jawa bersifat *subsintence*; ketiga skala usha yang kecil tersebut, menjadi semakin kecil dengan semakin berkurangnya lahan pertanian karena dialihfungsikan menjadi *real estate* dan

*industrial estate*; keempat daya dukung untuk alam yang semakin menurun; kelima adalah teknologi pertanian yang belum baik.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peta yang komprehensif dan *uniques* strategi ketahanan pangan, yang isinya terdiri dari: peta kebutuhan pangan untuk masing-masing wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat (misalnya peta pemenuhan kebutuhan sagu di Papua) dan peta produksi pangan, jaringan logistic pangan yang diperlukan untuk memberikan akses tinggi pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *surplus* unit dan *deficit* unit.

Strategi diversifikasi pangan belum berjalan secara maksimal, pangan sering hanya diidentikan dengan beras, padahal Indonesia sebenarnya sangat kaya akan *diversity* dari bahan pangan, seperti jagung, ubi-ubian. Perubahan kultur masyarakat yang dahulu mengkonsumsi selain beras (jagung, ubi-ubian dan sagu) menjadi beras sebagai makanan pokok sebenarnya kurang menguntungkan bagi daya saing pangan.

Strategi peningkatan daya saing pangan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan sisi *supply* (*supply side*) saja tetapi harus secara komprehensif, dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas *demand*, faktor-faktor produksi yang digunakan, struktur ekonomi dan industri pendukung. Oleh karena itu pendekatan kluster melalui *rescue based strategy* adalah cara yang optimal untuk meningkatkan kemandirian pangan dan daya saing bisnis pangan karena lebih sesuai dengan kondisi usahatani di Indonesia.

Strategi peningkatan daya saing pangan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan sisi *supply (supply side)* saja tetapi harus secara komprehensif, dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas *demand*, factor-faktor produksi yang digunakan, struktur ekonomi dan industri pendukung. Oleh karena itu pendekatan kluster melalui *rescue based strategy* adalah cara yang optimal untuk meningkatkan kemandirian pangan dan daya saing bisnis pangan karena lebih sesuai dengan kondisi usahatani di Indonesia.

Strategi peningkatan daya saing pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tukar petani, memperpendek saluran distribusi dari petani kepada konsumen, memperbaiki faktor-faktor pendukung bagi sektor pertanian seperti ketersediaan air untuk irigasi, prasarana jalan, perbankan dan sebagainya. Ada lima strategi yang sebaiknya digunakan untuk meningkatkan daya saing pangan yaitu :

- ❖ Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian;
- ❖ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di sektor pertanian;
- ❖ Revitalisasi ketersediaan daya dukung sektor pertanian dan perikanan, terutama pada sektor hulu;
- ❖ Memperbaiki teknologi pertanian;
- ❖ Memperpendek rentang distribusi antara petani dan konsumen.

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia telah mencapai taraf penggunaan teknologi modern yang mampu mendorong laju pertumbuhan produksi dan produktivitas sektor. Pengetahuan dan ketrampilan petani sebagai pengguna

teknologi telah semakin meningkat. Upaya-upaya pembinaan dan bimbingan terkait pengetahuan pasar dan pemasaran dilaksanakan hamper tanpa berhenti. Akan tetapi sampai saat ini kemampuan petani nasional untuk bersaing di ranah domestik dan global belum mencapai kondisi yang diharapkan.

Kementerian Pertanian telah melakukan strategi untuk meningkatkan daya saing pangan: (a) efisiensi transport logistic; (b) pemberdayaan kelembagaan petani; (c) peningkatan efisiensi produksi; (d) perbaikan infrastruktur; € edukasi sumber daya manusia. Berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk Peningkatan Daya Saing rtelah membukakan hasil terlihat dari dat BPS Ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai 168.828 juta dolar, dimana 90,67% berasal dari non-migas (pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan lainnya). Komoditas pemberi sumbangan terbesar adalah industry minyak sawit dan kopi. Komoditas lainnya seperti beras, bawang merah, jagung dan cabai memiliki peluang besar untuk peningkatan ekspor.



## BAB V

# PENUTUP

**I**ndonesia, sebagai negara maritim dan agraris, memiliki kelimpahan sumber daya alam, seharusnya dapat dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Indonesia masih bergantung pada impor, petani masih miskin dan banyak usia produktif meninggalkan pertanian.

Konsep dan sikap daya saing berasal dan berkembang dalam budaya egaliter. Sifat dan sikap berdaya saing berkembang dari budaya korporasi yang selain memiliki keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif yang mendorong inspirasi untuk mengembangkan sesuatu secara nyata, tidak hanya berhenti dalam konteks abstrak berupa gagasan atau pendapat, namun dikembangkan dalam bentuk konkrit berupa rekayasa dan rekayasa. Daya saing terjadi karena keunggulan kompetitif sumber daya manusia (SDM). Daya saing yang tinggi dihasilkan oleh keunggulan kreatif dalam membunikan gagasan menjadi produk yang nyata. Guna mencapai hierarki berfikir kreatif diperlukan suatu sistem pendidikan sebagai faktor utama menuju hierarki tersebut.

Permasalahan yang terjadi dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai. Kedaulatan pangan ini mampu tercapai apabila terdapat arah kebijakan yang tegas dan implementasi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Melalui Peningkatan produktivitas pertanian dari sektor hilir, hulu dan jasa penunjangnya, Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan, yang merupakan hak setiap warga negara.

Kebijakan dan program pangan dari masing-masing instansi harus dipersatukan menjadi kebijakan dan program nasional yang sistematis, konsisten dan terpadu.

Setidaknya beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Di Indonesia, masih banyak petani yang berpotensi terkena dampak perdagangan bebas. Ketersediaan informasi dari data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk petani merupakan hal yang perlu dilakukan
- Memperbaiki kebijakan hukum yang berlaku. Sinkronisasi pada kebijakan ini perlu dilakukan agar setiap kementerian

berjalan dengan tujuan yang sama walaupun memiliki langkah yang berbeda

- Mengembangkan sektor komplemen pertanian (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar)
- Mempelajari kebijakan-kebijakan dari negara lain. Hal ini perlu dilakukan karena daya saing tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dihasilkan oleh *resultane* dari kebijaksanaan di dalam negeri dan kebijaksanaan dari negara-negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2020. <https://haipb.ipb.ac.id/opini/ketahanan-pangan-nasional-dengan-konsep-pangan-fungsional>
- BPS. 2017. *Statistik Indonesia 2017*. Badan Pusat Statistik.
- Daryanto. 2010. *Position of Agriculture Compettiveness in Indonesia anda Its efforts for Improvement*. <http://ariefdaryanto.blog.mb.ipb.ac.id/2010/07/20/posisi-daya-saing-pertanian-indonesia-dan-upaya-peningkatannya>
- Dumasari. 2014. *Kewirausahaan Petani Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro di Pedesaan*. Jurnal Inovasi dan Keworausahaan. Vol 3 No. 3. Hal 196-205
- Glatzel, Annete. 2008. *Coorporate Cultur as Competitive Advantage*. Schiller International University
- Gustiana, Cut. 2015. *Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis*. Agrisamudra, Jurnal penelitian. Vol 2 No 1. Hal 71-80.
- Harini, Purwaningsih, Cahyadin. 2016. *Analisis Faktor Penentu Daya Saing Komoditas Pangan di Propinsi Jawa Tengah*. JIEP. Vol 16 No. 1. Hal 65-73.
- Haryono, Dr.Ir.MSc. 2019, *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia. IAARD Press. Jakarta

- Ikhsani, Tasya, Inati, dkk. 2020. *Arah Kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. <http://jakp.fisip.unand.ac.id> . Hal 134-154.
- Kusnadi. 2021. *Peningnya Akses Informasi Untuk Mendukung Aktivitas Usaha Tani*. Info Publik. Aceh Tengah <https://infopublik.id/kategori/nusantara/507553/pentingnya-akses-informasi-untuk-mendukung-aktivitas-usaha-tani>
- Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice. (1994). *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan* (Ed. Ke-2.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lagiman. 2020. *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*. Prosiding Seminar Nasional UPN Veteran Jogyakarta. Hal 365-381.
- Miyasto, SU. 2014. *Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jurnal Kajian Lemhanas RI. Edisi 17 Volume 17 (Hal. 17-34);
- Permadi, Emilia, Zulgani. 2018. *Daya Saing Produk Unggulan Sektor Pertanian Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol 13 No. 2. Hal 77-86

- Rifdah. 2021. *Survey WCW 2021: Daya Saing Indonesia Naik ke Peringkat 37. Ini Catatannya.* <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/08/20/survei-wcy-2021-daya-saing-indonesia-naik-ke-peringkat-37-ini-catatannya/>
- Silfia, Helmi, Melinda, Henmaidi. 2018. *Penguatan Daya SAing Sektor Pertanian Berbasis Usaha Tani Skala Kecil: Review Literatur.* Jurnal Pembangunan Nagari. Vol 3 No. 1. Hal 109-122.
- Soetrisno. 2017. *Daya Saing Pertanian Dalam Tinjauan Analisis.* Intimedia. Malang.
- Sumaryanto, 2010. *Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era-Persaingan Pasar Global.* Bogor.
- Susilowati. 2016. *Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian.* Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 3 No. 1, Hal 35-55.
- Syachbudy, Firdaus, Daryanto. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Ekspor Produk Pertanian Indonesia Ke Negara Kurang Berkembang.* Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol. 5 No. 1, Hal 57-74
- Teguh Firmansyah. 2021. *Pengembangan Korporasi Petani untuk Kesejahteraan Petani* Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/qzqsuq377/akselerasi-korporasi-petani-untuk-kesejahteraan-petani>

Zulgani, Syaparuddin, Parmadi. 2014. *Analisis Daya Saing Produk Agroindustri Subsektor Perkebunan Dalam Perekonomian Wilayah Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol 2 No.1. Hal 29-38.

### **Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012. *Ketahanan Pangan*;  
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. *Label dan Iklan Pangan*;

Peraturan Badan POM. 2005. *Peraturan Teknis Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional*;

## BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP,** lahir di Jakarta, 20 Juni 1956, merupakan salah satu Guru Besar di UPN “Veteran” Jawa Timur sejak tahun 2008. Gelar Magister Ekonomi Pertanian ditempuh dari UGM Yogyakarta pada tahun 1994. Gelar Doktor ditempuh di Universitas

Brawijaya Malang pada tahun 2004. Penulis terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat regional, nasional maupun internasional. Saat ini Penulis terlibat sebagai Tim Pengendali Mutu Penelitian & Pengembang Balitbang Provinsi Jawa Timtu; Tim Pakar penilai Dokumen AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Email : [teguh\\_soedarto@upnjatim.ac.id](mailto:teguh_soedarto@upnjatim.ac.id)





**Yeni Ika Pratiwi, SP., M.Agr**, lahir 22 Juni 1977 di Trenggalek Jawa Timur, adalah Staf Pengajar di Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Surabaya. Gelar Magister Agribisnis ditempuh dari Magister Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur pada tahun 2014. Penulis terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di kampus maupun Dinas di Propinsi Jawa Timur, Tim Ahli Komoditi Tebu, Tim Ahli Komoditi Tembakau, Tim Ahli Retribusi dan Pajak Pemda Kabupaten Sumenep. Buku yang dihasilkan diantaranya : Pemanfaatan Biomas Sampah Organik; Peningkatan Manfaat Pupuk Organik Cair Urine Sapi; Dasar-Dasar Agronomi; Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Tembakau Provinsi Jawa Timur; Dosen Merdeka; Antologi Inspiring Lecturer by Paragon 2021: Refleksi; Email : [yeniikapratiwi.unmer@gmail.com](mailto:yeniikapratiwi.unmer@gmail.com)